



REVISI

RENCANA STRATEGIS



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI**

**DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

2016 - 2021

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU**

**Jl. Dorak Ujung No. Selatpanjang
Telp. 0763- 8001555/fax. 0763-8001555**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya jualah kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 – 2021 dengan baik.

Dokumen Rencana Strategis Pereubahan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama kurun waktu perencanaan yaitu 2016 – 2021 dan sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 – 2021.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen rencana strategis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selatpanjang, 25 Januari 2019

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



Drs. ASRORUDIN, M.SI

NIP. 19670204 199508 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINSOS PPPA PPKB KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	11
2.1 Sturktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	48
3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	48
3.2 Telaahan, Visi, Misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.....	52
3.3 Telaah Renstra	58
3.4 Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan.....	72
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	74
4.1 Tujuan	74
4.2 Sasaran	74
BAB V STRATEGI DAN ARAH TUJUAN.....	77
5.1 Strategi.....	77
5.2 Arah Kebijakan	81

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	84
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	111
BAB VIII	PENUTUP	113

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) salah satu dinas dari 16 dinas yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki tiga urusan dan 15 sub urusan. Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan kabupaten berpulau-pulau telah melaksanakan pilkada untuk memilih bupati dan wakil bupati periode 2016-2021. Konsekuensi dari hasil pilkada, pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menjabrkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

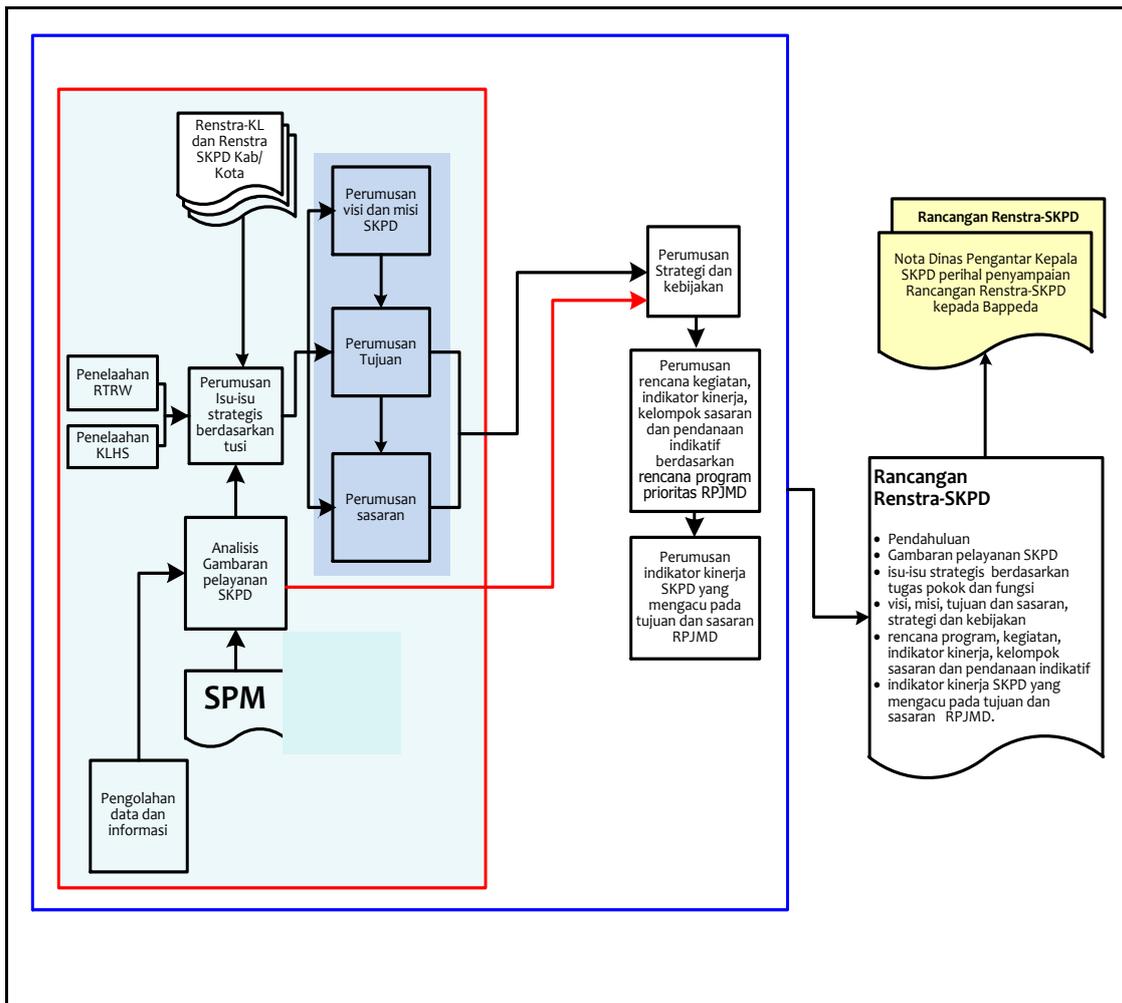
Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinsos PPPAPPKB dengan RPJMD, Renstra Kementerian PPPA , Renstra BKKBN, Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Provinsi Riau, serta dengan Renja diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Meranti Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti, RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021 dan memperhatikan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPPA), BKKBN, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Provinsi Riau, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Renstra disusun memperhatikan hasil evaluasi kinerja Renstra sebelumnya dengan memperhatikan masukan dari stakeholder Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan RenstraDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) Kabupaten Kepulauan Meranti

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RenstraDinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27, 28, 33 dan 34
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021
11. Perda Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
1. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung Visi dan Misi Bupati. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021;
- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPAPPKB) Kabupaten Kepulauan Meranti;

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti, telaahan Renstra Kementerian PPPA,

Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Sosial dan BKKBN, telaahan Renstra Provinsi Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINSOS PPPA PPKB
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti.

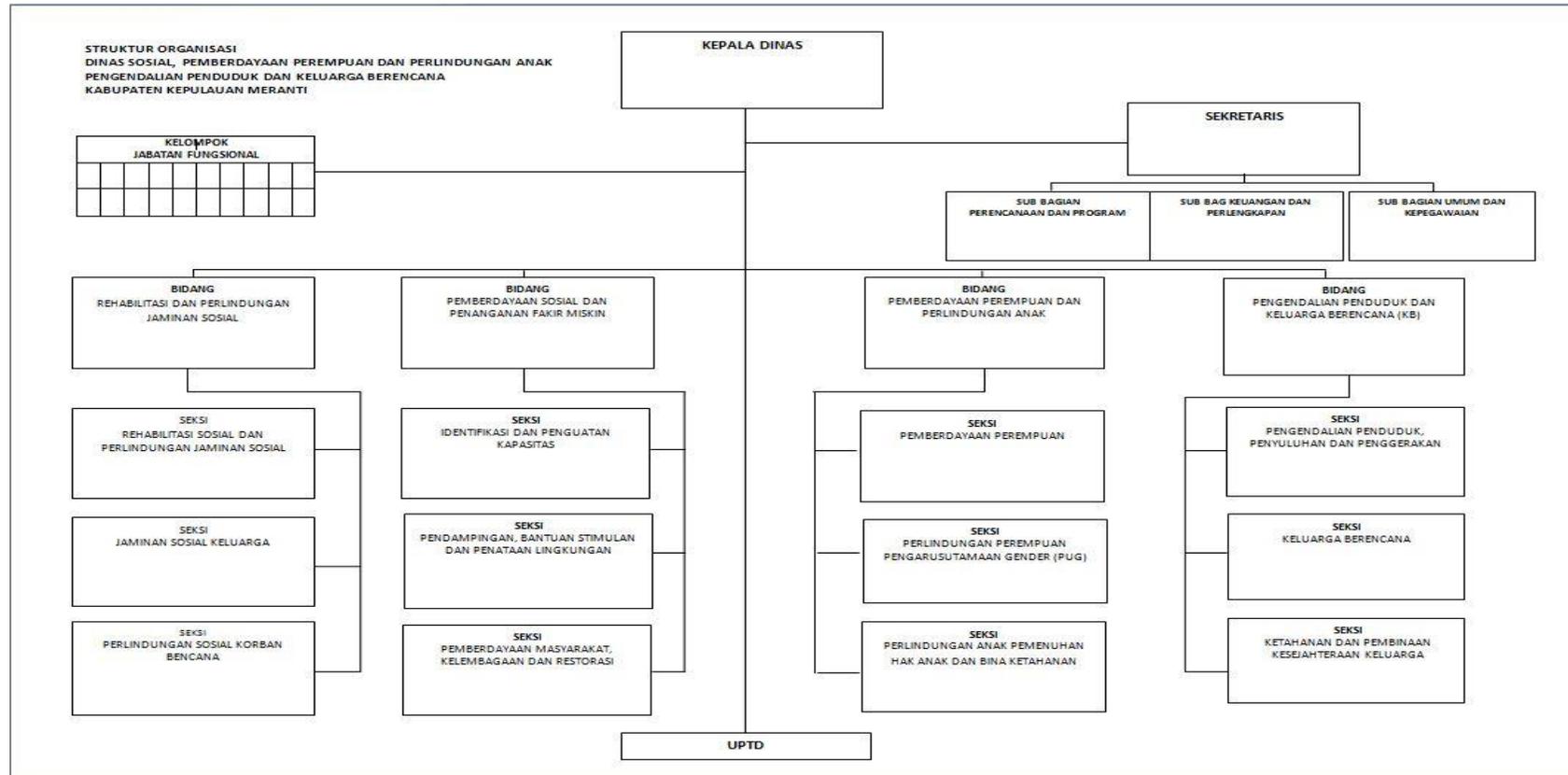
Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, terdiri dari;
 1. Sub Bagian Perencanaan Dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan Dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
- c) Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Jaminan sosial;
 2. Seksi Jaminan Sosial Dan Keluarga;
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana.

- d) Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, terdiri dari:
1. Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas;
 2. Seksi Pedampingan, Bantuan Stimulan Dan Penataan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Dan Restorasi.
- e) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdiri dari:
1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Perempuan, Pengurus Utamaan Gender (PUG);
 3. Seksi Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak Dan Bina Ketahanan.
- f) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan;
 2. Seksi Keluarga Berencana;
 3. Seksi Ketahanan Dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga.
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi



Sumber :Subbag. Umum

2.1.2 Uraian Tugas

Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Meranti Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti mengamanatkan melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial (6 sub urusan), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (6 sub urusan), pengendalian penduduk dan KB (3 sub urusan).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti menyelenggarakan fungsi :

- a. Urusan Sosial yaitu Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan Taman Makam Pahlawan;
- b. Urusan PPPA yaitu Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan Perempuan, Kualitas Keluarga, Sistem Data Gender dan Anak, Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak;
- c. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB yaitu Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kepala

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kepala Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang, perumusan, Umum, Kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi Keuangan dan Perlengkapan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- 1) Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja
- 2) Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan

- 3) Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi bagian umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan
- 4) Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meneliti laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana
- 5) Melaksanaan pengkoordinasian peyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

c. Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial.

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana;

3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial kelurga dan perlindungan sosial korban bencana;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, jaminan keluarga dan perlindungan sosial korban bencana; dan
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial korban bencana.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan tentang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 2) Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 3) Penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan pertahun anggaran seksi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- 4) Penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan pertahun anggaran seksi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai dengan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- 5) Penyelenggaraan pelaksanaan pedoman teknis seksi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 6) Penyelenggaraan penyusunan data gender di semua bidang pembangunan;
- 7) Penyelenggaraan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 8) Melaksanakan penyiapan pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG);

- 9) Penyelenggaraan penatalaksanaan administrasi, dokumen seksi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- 10) Melaksanakan perumusan kebijakan tentang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
- 11) Melaksanakan perumusan koordinasi sehubungan dengan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
- 12) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak;
- 13) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya;
- 14) Menyiapkan pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- 15) Melaksanakan fasilitasi terkait dengan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan anak, partisipasi anak, dan perlindungan anak;
- 16) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak; dan;
- 17) Penyelenggaraan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (nspk) dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 5) Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten/kota;
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 7) Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- 8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 10) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten/kota;

- 11) Pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota;
- 12) Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di kabupaten /kota;
- 13) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana;
- 14) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana;
- 15) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- 16) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 17) Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 18) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita;
- 19) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R);
- 20) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia;
- 21) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- 22) Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 23) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- 24) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah aparatur di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 82 orang. Terdiri dari ASN sebanyak 32 Orang dan non ASN sebanyak 50 Orang. Atas sejumlah tersebut ternyata masih terdapat ASN dengan pendidikan SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 10 orang, Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1	-	4	9	14
2	SMA Sederajat	2	8	2	8	20
3	D3	1	4	3	3	11
4	S1	10	3	10	10	33
5	S2	6	1	1	-	8
6	S3	-	-	-	-	
	Jumlah	16	16	20	30	82

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sebagai konsekuensi dari urusan yang harus diemban. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenuhi hal tersebut adalah :

1. Peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan tugas dan fungsi;

2. Penambahan SDM untuk mendukung urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 3. Peningkatan wawasan dengan penyediaan peralatan yang mendukung;
 4. Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi informasi.
 5. Peningkatan kompetensi ASN sesuai dengan tugas dan fungsi
- Kualitas SDM juga dapat dilihat dari karir yang diembannya. Hingga saat ini ASN dengan golongan II masih terdapat 6 orang, golongan III sebanyak 15 orang. Hal ini dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	3	3	6
2	Golongan III	8	7	15
3	Golongan IV	8	-	8

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian

Memperhatikan tabel diatas, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan status golongan yang ada yaitu melalui kesempatan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan beasiswa pemerintah daerah, rekomendasi studi atas biaya sendiri, penyesuaian golongan bagi yang telah melanjutkan studi, serta peningkatan kinerja ASN.

Karir ASN sangat ditentukan oleh kualifikasi pendidikan, kinerja, serta *goodwill* dari pimpinan daerah. Karir tersebut dapat dibangun melalui berbagai upaya yang sinergis dan berkelanjutan baik pribadi maupun secara kelembagaan. Hingga saat ini jumlah pejabat eselon III sebanyak 5 orang, Eselon IV

sebanyak 15 orang. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
di Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	8	7	15

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian

Memperhatikan tabel tersebut nampak bahwa posisi eselon IV masih dijabat oleh laki - laki. Oleh karenanya diperlukan *afirmative action* agar jabatan eselon IV dan III dapat ditempati oleh perempuan maupun laki-laki.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana merupakan hal yang sangat urgen menopang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti. Sarana prasarana memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja organisasi serta kinerja aparatur.. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sarana prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinsos
PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Utama	1		1
2	Gedung Aula	1		1
3	Pertemuan	1		1
5	Gedung Asrama Pelajar KAT	1		1
6	TMP	1		1
7	Gedung TAGANA	1		1
8	Gedung UPPKH	1		1
9	Mushola	1		1
10	Mobil Avanza	1		1
11	Mobil Pick Up		1	1
12	Mobil Rescue Tagana	1		1
14	Sepeda Motor VERZA	1		1
15	Sepeda Motor YAMAHA	2	2	4
16	Speedboat TAGANA	-	1	1
17	Komputer	10	5	15
18	Laptop	5	3	8
19	Printer	10	5	15
20	Proyektor	1		1
21	Mesin Fotocopy	1		1
22	AC	8	4	12
23	Kipas Angin	4	2	6
24	Sound system	1		1
25	Dispenser	2	1	3
27	Mesin Air	1	1	2
28	Mesin Potong Rumput	1	1	2
39	Mesin Genset		1	1
30	Umbul - Umbul	30		30
31	Meja rapat	1		1
32	Meja ½ biro	12	3	15
33	Kursi putar	10		10
34	Meja kursi tamu	3		3
35	Kursi aula	100		100
36	Lemari arsip	8	2	10
37	Lemari besi	4	1	5
38	Box	4	1	5

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian

Memperhatikan kondisi sebagaimana tersebut diatas, Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti memerlukan

sarana prasarana untuk Tahun 2016 –2021 yang harus dipenuhi yaitu :

1. Mobil sebanyak 1 (satu) unit
2. Sepeda Motor sebanyak 15 Unit
3. Komputer sebanyak 10 (sepuluh) Unit
4. Printer Sebanyak 10 (sepuluh) Unit
5. Meja Kursi kerja ½ biro sebanyak 15 set
6. Lemari arsip sebanyak 10 unit
7. AC 1 PK sebanyak 5 unit
8. Mesin Fotocopy sebanyak 1 unit
9. Mesin Babat rumput sebanyak 5 unit
10. Mesin Genset sebanyak 1 unit
11. Camera Canon 1 Unit
12. Brangkas 1 buah
13. Hardisk external 5 buah

Pertimbangan kebutuhan sarana prasarana itu karena barang-barang tersebut sudah waktunya harus diganti, serta kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda dan harus dipenuhi.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pelayanan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Dalam Kurun waktu 2011 – 2015 Dinas Sosial Telah Melaksanakan Pemberdayaan dan Pelayanan terhadap PMKS. Pelayanan tersebut diberikan dalam bentuk pelayanan dasar meliputi pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar bagi PMKS yang diberikan berupa Rehab Rumah Tidak Layak huni.

Tabel 2.4:
Jumlah PMKS dan KAT yang menerima bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni 2011 – 2015

No	KECAMATAN	DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI					TOTAL
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Tebing Tinggi	9	10	27	24	4	74
2	Tebing Tinggi Barat	1	10	9	8	-	28
3	Merbau	1	10	9	7	-	27
4	Rangsang	5	10	9	8	5	37
5	Rangsang Barat	1	10	9	-	-	20
6	Rangsang Pesisir	-	-	9	8	-	17
7	Tebing Tinggi Timur	-	10	9	8	-	27
8	Pulau Merbau	-	10	9	8	2	29
9	Tasik Putri Puyu	-	-	9	8	1	18
	Jumlah	17	70	99	79	12	277

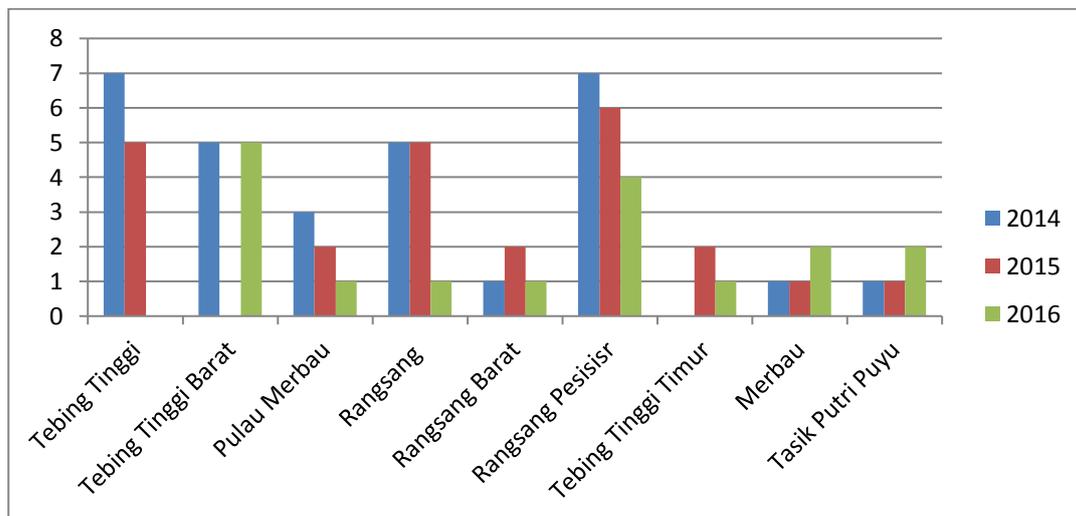
Sumber : Bidang Dayasos Fakir Miskin

Tabel 2.5
Jumlah korban kebakaran yang menerima bantuan kebutuhan dasar
Tahun 2014 – 2016

NO	KECAMATAN	2014	2015	2016	TOTAL
1	Tebing Tinggi	7	5	-	13
2	Tebing Tinggi Barat	5	-	5	10
3	Pulau Merbau	3	2	1	6
4	Rangsang	5	5	1	11
5	Rangsang Barat	1	2	1	4
6	Rangsang Pesisir	7	6	4	17
7	Tebing Tinggi Timur	-	2	1	3
8	Merbau	1	1	2	4
9	Tasik Putri Puyu	1	1	2	4
	Jumlah	30	24	17	71

Sumber : Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 2.1 : Korban Kebakaran Yang menerima layanan 2014 – 2016

Sumber : Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Selain pelayanan tersebut diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kepulauan Meranti juga melaksanakan pelayanan terhadap PMKS lainnya. Antara lain pelayanan pengiriman pasien

gangguan jiwa ke trauma center, pemulangan orang terlantar, pengiriman social klien, bantuan bagi penyandang disabilitas, bantuan peralatan usaha bagi KUBE masyarakat miskin. Untuk lebih jelasnya dapat disimak pada tabel berikut:

Table 2.6
Pelayanan terhadap PMKS tahun 2010 – 2016

NO	KECAMATAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
1.	Pasien Gangguan Jiwa	-	-	20	20	40	31	9	120
2.	Orang Terlantar	-	-	-	-	21	30	28	79
3.	Sosial Klien	10	20	24	30	21	30	8	143
4.	Penyandang Disabilitas	2	4	4	8	4	2	-	24
5.	KUBE	-	2	30	103	83	42	-	260
	Jumlah								626

Sumber : Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

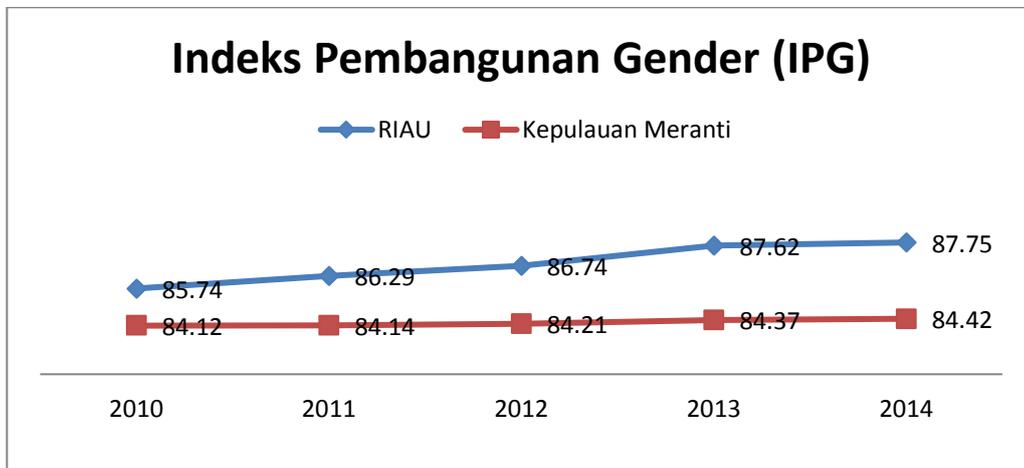
Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah PMKS yang menerima pelayanan masih rendah jika dibandingkan dengan total PMKS yang mencapai 14 ribu jiwa. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap PMKS di masa mendatang.

2. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG

dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

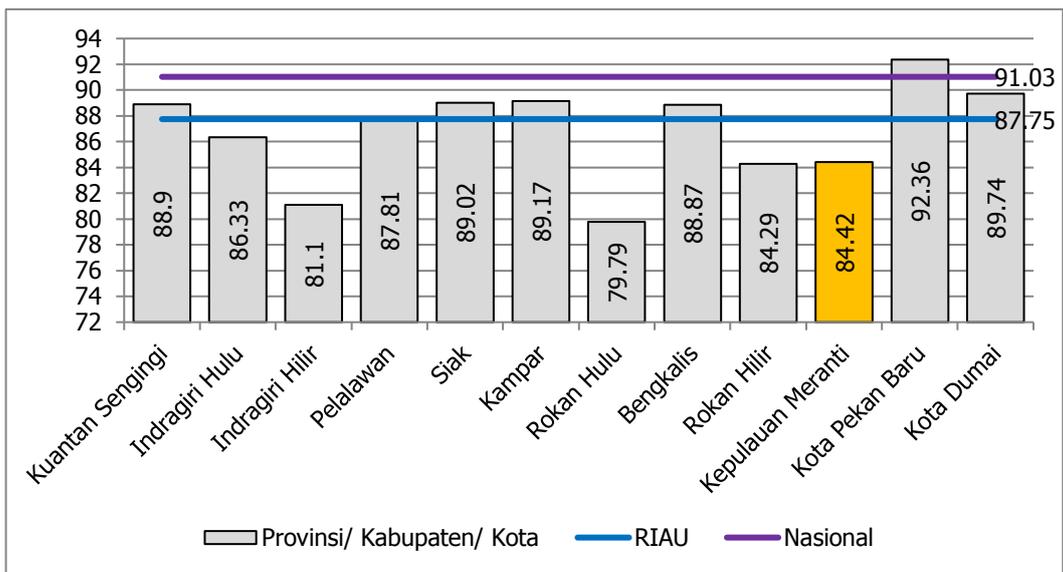
IPG Kabupaten Kepulauan Meranti Mengalami peningkatan sejak tahun 2011 hingga tahun 2015. Tahun 2011 IPG Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 84,12, Tahun 2015 Meningkatkan menjadi 84,42. Jika dibandingkan dengan Provinsi Riau IPG Kabupaten Kepulauan Meranti masih dibawah rata – rata IPG Provinsi Riau. Perkembangan IPG KABUPATEN Kepulauan Meranti selengkapnya dapat dilihat pada Gambar Berikut :



Gambar 2.2 Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Riau dengan IPG Kepulauan Meranti

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

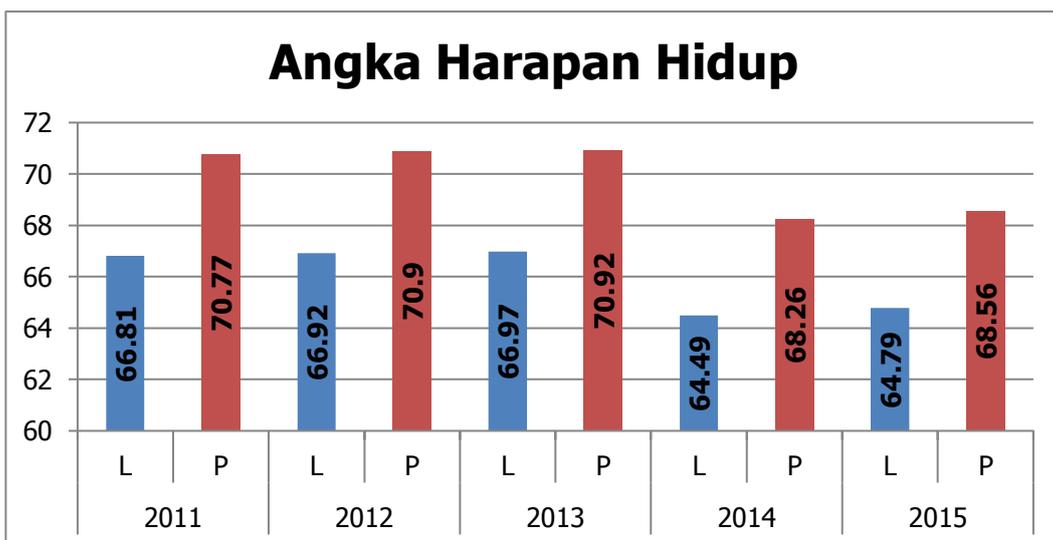
Di perbandingan dengan Kab / kota di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Pencapaian IPG masih berada dibawah rata – rata Provinsi dan Nasional. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Kota di sekitar IPG Kabupaten Kepulauan Meranti di atas IPG kabupaten Indragiri Hilir dan Rokan Hulu. Namun berada di bawah Kabupaten Lainnya. Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut:



Gambar 2.3. Grafik IPG Kabupaten Meranti diperbandingkan dengan IPG kabupaten/Kota di Provinsi Riau 2010-2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015

Melihat posisi IPG sebagaimana tersebut diatas, dapat digambarkan pencapaian indikator pembentuk IPG, yaitu usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, rata-rata harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita penduduk. Capaian angka harapan hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimak pada gambar sebagai berikut :

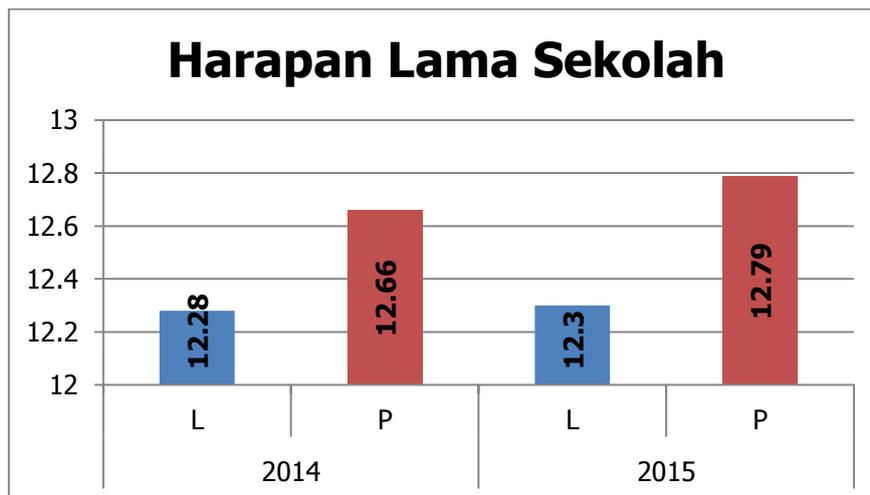


Gambar 2.3 : Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Menyimak table grafik tersebut diatas, kabupaten kepulauan meranti mengalami penurunan usia harapan hidup bagi perempuan dan laki-laki dari tahun 2013 ke tahun 2014, Tahun 2015 angka harapan hidup kabupaten kepulauan meranti meningkat mencapai 64,79 Tahun untuk laki-laki dan 68,56 Tahun untuk perempuan.

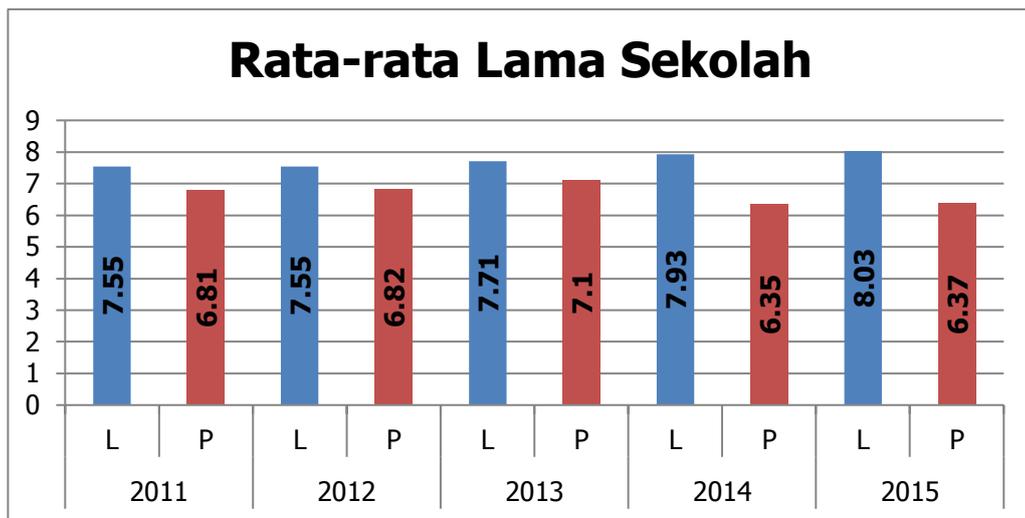
Capaian pembentuk IPG lainnya adalah harapan lama sekolah. Capaian harapan lama sekolah kabupaten kepulauan meranti menunjukkan komposisi yang tidak setara. Laki-laki memiliki harapan lama sekolah lebih rendah dibandingkan perempuan. catatan penting dari grafik ini adalah pentingnya meningkatkan harapan lama sekolah khususnya bagi laki-laki. Selengkapnya grafik dapat dilihat dibawah ini :



Gambar 2.4 : Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

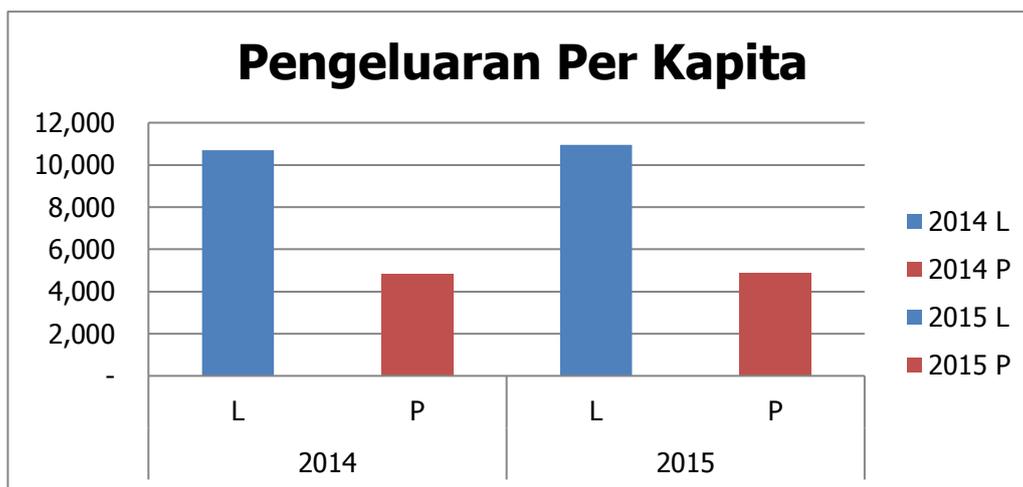
Rata – rata lama sekolah kabupaten kepulauan meranti antara laki – laki dan perempuan menunjukkan kesenjangan yaitu capaian rata – rata lama sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki – laki. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut :



Gambar 2.5 : Grafik Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Rata – rata pengeluaran perkapita perempuan Kabupaten Kepulauan Meranti jauh dibandingkan dengan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa perempuan hanya bergantung pada sector domestic dibandingkan dengan sector public. Penyebab utamanya adalah masih belum optimalnya kesempatan kerja bagi perempuan di sector – sector public. Perbedaan tersebut dipaparkan pada grafik berikut :

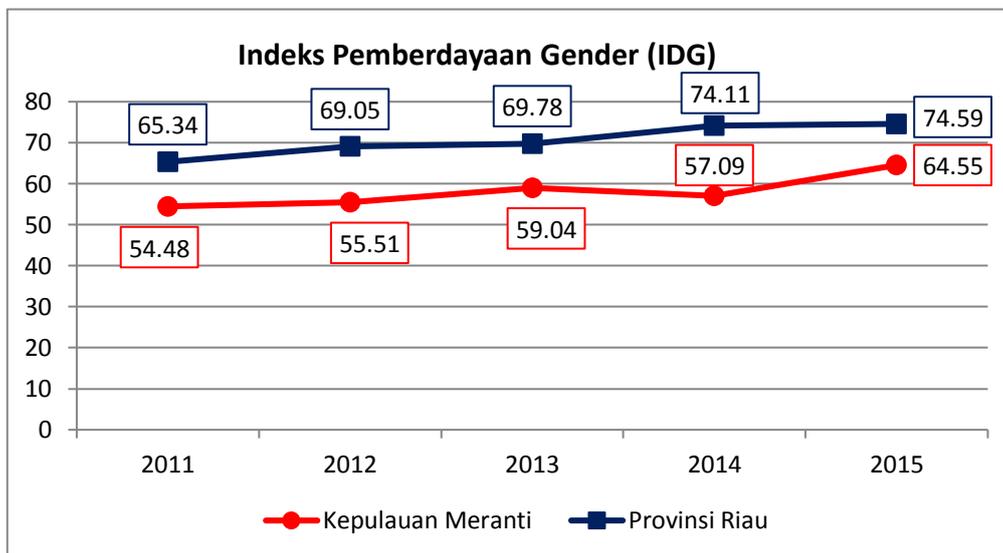


Gambar 2.6 : Grafik Rata-rata Pengeluaran Perkapita Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

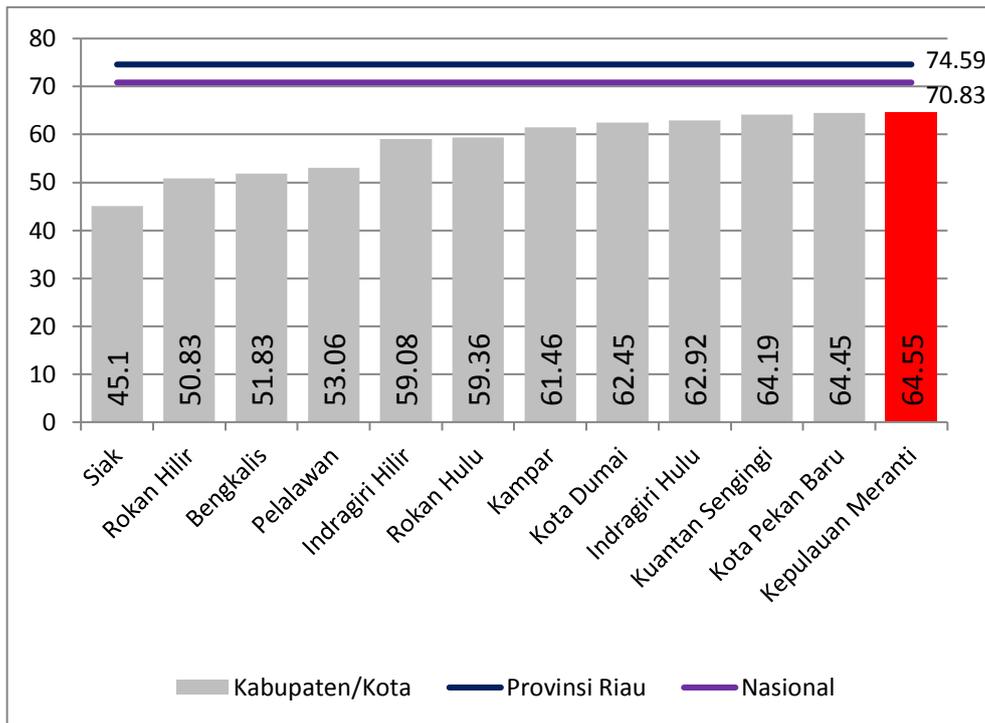
Capaian IDG Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk dalam katerori tinggi. Hal ini ditunjukkan dalam angka IDG pada tahun 2015 mencapai 64,55%. Data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 2.7 : Grafik IDG Kabupaten Kepulauan Meranti 2011-2014

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

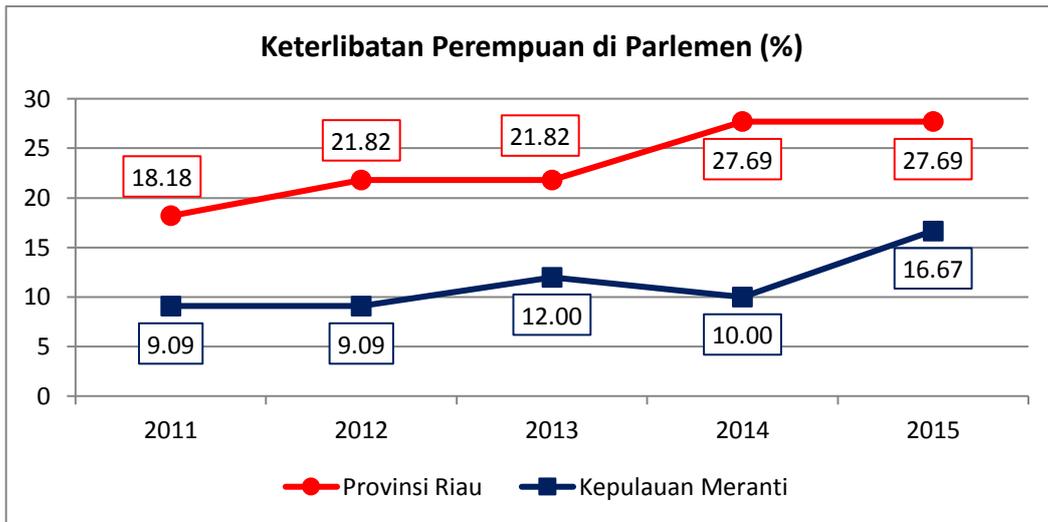
Jika dibandingkan dengan capaian IDG Kab/Kota di Provinsi Riau, maka kesenjangan antara kabupaten kota Nampak sedemikian jauh. Kabupaten kepulauan meranti berada di ranking tertinggi yaitu sebesar 64,55 % di Provinsi Riau. Meskipun demikian masih diperlukan upaya untuk meningkatkan IDG melalui *afirmative action*. Selengkapnya grafik dapat disimak pada rambar berikut :



Gambar 2.8 : Grafik IDG Kabupaten Kepulauan Merantidibandingkan Kab/Kota Se Provinsi Riau 2011-2014

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

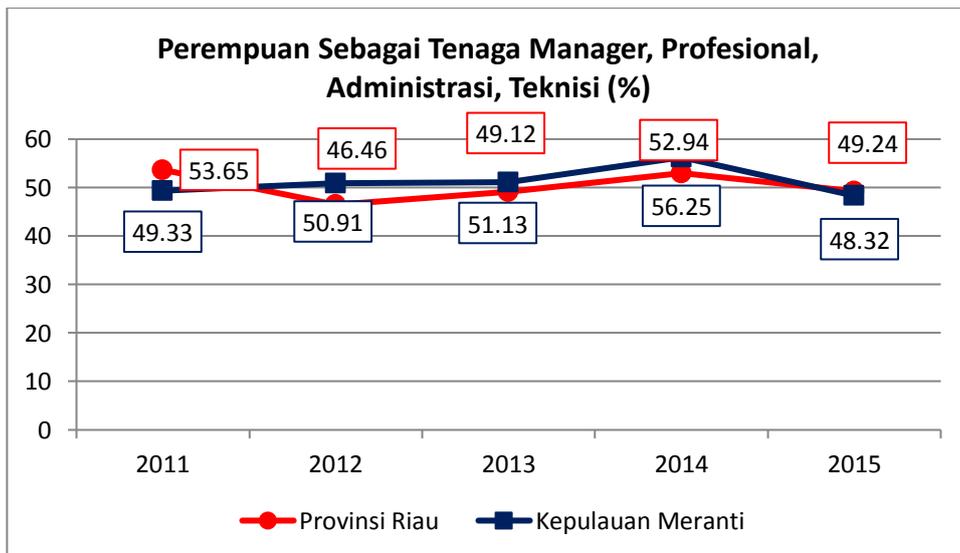
Pembentuk IDG antara Lain adalah perempuan di legislative. Sesuai dengan Undang – Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 quota Perempuan di Legislatif sebanyak 30 %. Hingga tahun 2015 capaian sebagaimana tersebut dalam Undang – undang Pemilu belum sepenuhnya tercapai. Hingga tahun 2015, capaian perempuan di Legislatfi Kabupaten Kepulauan Meranti hanya 16, 67 % artinya hanya terdapat 5 orang anggota DPRD di Kabupaten Kepulauan Meranti. Data perkembangan Perempuan di DPRD kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimak pada Gambar berikut :



Gambar 2.7 : Grafik Persentase Perempuan di DPRD Kabupaten Meranti 2014 - 2019

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

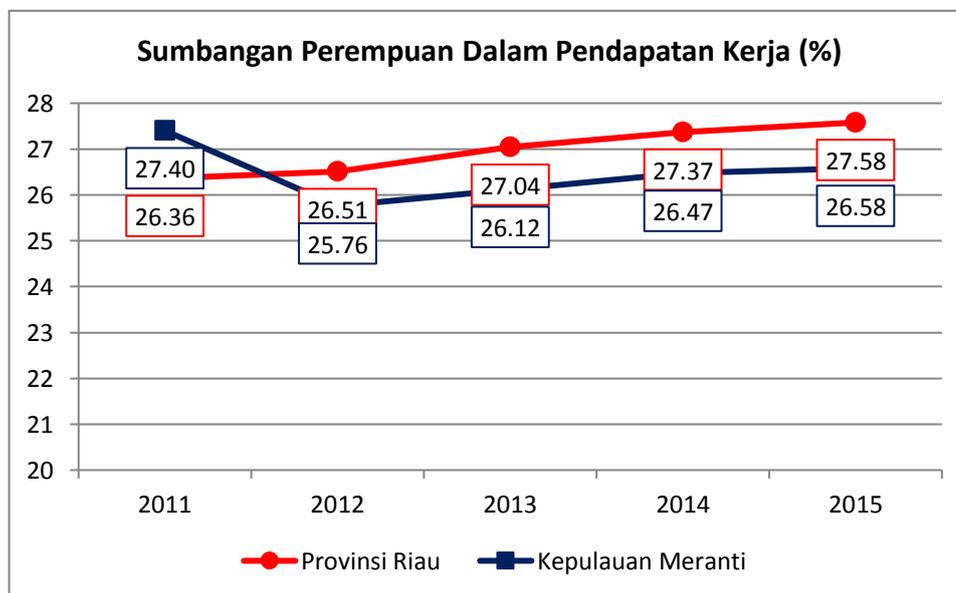
Indikator pembentuk IDG lainnya adalah persentase perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi, teknisi. Capaian kabupaten kepulauan meranti atas indicator ini sebesar 48,32 %. Angka ini termasuk dalam angka yang bagus, mengingat jumlah ini menunjukkan keberdayaan perempuan di sector formal. Data selengkapnya dapat disimak pada garafik berikut :



Gambar 2.8 : Grafik Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Meranti 2011-2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2016.

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja menjadi indikator yang harus diperhitungkan dalam capaian IDG. Indikator ini berhubungan langsung dengan keterlibatan perempuan dalam sector public. Indikator ini juga menunjukkan keberdayaan perempuan dalam menopang ekonomi keluarga. Hingga tahun 2015, capaian indikator ini di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan posisi rendah yaitu sebesar 26,58%. Meskipun jumlah perempuan di sector formal tinggi namun upah perempuan sangat rendah. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut :



Gambar 2.11 : Grafik Persentase Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 - 2015

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015

Selain capaian IPG dan IDG, indikator yang harus mendapatkan perhatian adalah indikator yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Sejak tahun 2013 - 2016 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mencapai 74 kasus. Secara umum kasusnya meningkat setiap tahunnya. Diantaranya anak berhadapan hukum (ABH) 19 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 27 kasus, kekerasan fisik 28

kasus, kekerasan Psikis 2 kasus, kekerasan seksual 17 Kasus, penelantaran anak 4 Kasus dan penelantaran perempuan 6 Kasus. Pada tahun 2015 kasus Anak di Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat menjadi 15 kasus terdiri dari Anak Berhadapan Dengan Hukum 8 kasus, Pencabulan dan perkosaan Anak 6 kasus dan anak terlantar 1 kasus.

3. Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)

Terdapat tiga sub urusan dalam kewenangan pemerintah kabupaten Kota untuk pengendalian penduduk dan KB yaitu pengendalian penduduk, KB dan keluarga sejahtera. Atas tiga urusan tersebut dapat diungkapkan beberapa permasalahan atas urusan tersebut yaitu : (a) Banyaknya penduduk yang migrasi ke kota akibat faktor ekonomi; (2) bonus demografi pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan) yang belum dioptimalkan pemanfaatannya; (3) unmeet need tinggi; (4) rendahnya cakupan KB mandiri; (5) pernikahan perempuan di bawah 20 tahun dikarenakan tekanan ekonomi keluarga; (6) rendahnya laki-laki dalam ber KB; (7) distribusi alokasi belum sesuai kebutuhan dikarenakan pengadaan alokasi dan assement kebutuhan berada di SKPD lain (Dinkes); (8) masih ditemukan Keluarga PS dan KS I dan masih rendahnya upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan.

Dalam kurun waktu 2011 – 2015 kinerja pelayanan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari PUS yang mengikuti Kb aktif, Unmeet need, TFR, IMP, PIK-R dan beberapa indikator lainnya.

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Berikut adalah

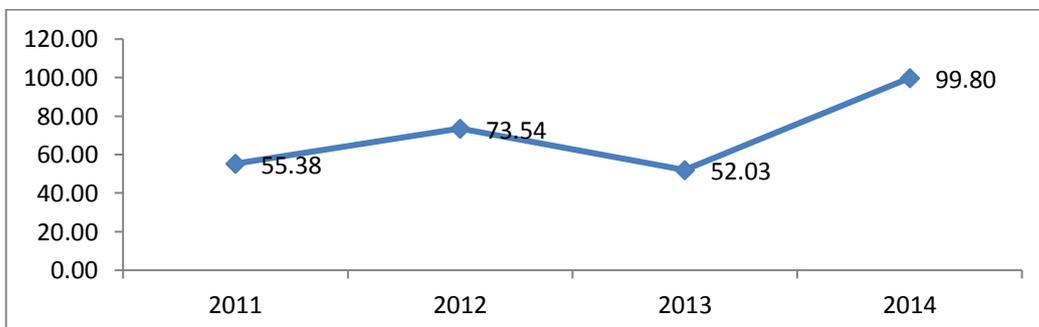
tabel rata-rata anak per keluarga dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pada Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 2.54 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Keterangan	2010	2011	2012	2013	2014
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	2	2	2	1	2

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2015 (Data diolah)

Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari pemerintah pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat. Keluarga berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Program keluarga berencana yang membatasi jumlah kelahiran dilakukan dengan cara penggunaan alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD dan sebagainya. Akseptor KB itu sendiri berarti Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB menghitung jumlah akseptor KB dalam periode 1 tahun per 1000 pasangan usiasubur pada tahun yang sama.



Gambar 2.11 : Rasio Akseptor KB (%)

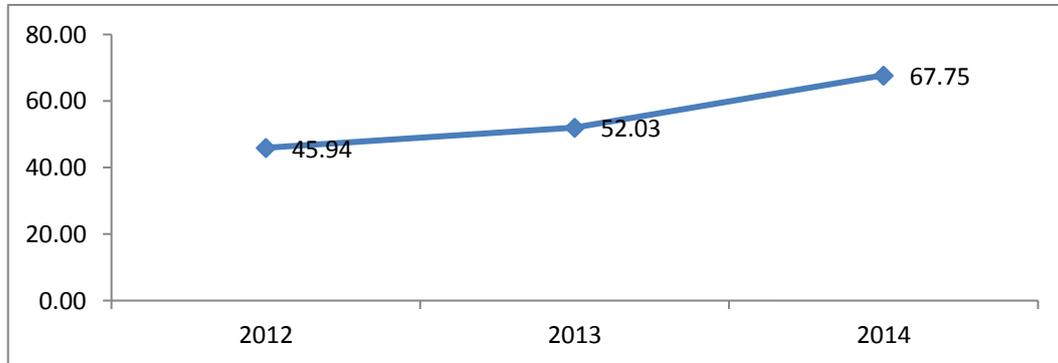
Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2015 (Data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa rasio akseptor KB terus meningkat yang awalnya pada tahun 2011 tercatat hanya 55,38 persen, tetapi pada tahun 2014 tercatat sebesar 99,8%. Semakin rendahnya rasio akseptor KB dapat menunjukkan semakin rendahnya jumlah penduduk pengguna KB dibandingkan dengan pasangan usia subur. Saat ini pemerintah pusat banyak melakukan promosi tentang KB melalui iklan di televisi, akan lebih baik apabila program ini di teruskan ke daerah. Pemerintah dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu mempromosikan KB melalui berbagai media seperti *workshop* atau seminar dengan tujuan dapat bertemu langsung dengan calon akseptor KB.

Pelayanan KB berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka kematian Ibu dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan yang telah cukup memiliki anak (2 anak lebih baik) serta meningkatkan fertilitas bagi pasangan yang ingin mempunyai anak. Keluarga berencana (KB) dapat meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Tahun 2012 nilai cakupan peserta KB Aktif tercatat 45,94%, selanjutnya tahun 2014 tercatat 67,75%. Hal ini menggambarkan trend yang positif dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Dengan hal ini semakin tingginya cakupan peserta KB dapat menunjukkan

semakin tingginya jumlah penduduk pengguna KB dibandingkan dengan pasangan usia subur.



Gambar 2.12 : Cakupan Peserta KB Aktif (%)

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2015 (Data diolah)

Selanjutnya indikator yang perlu menjadi perhatian terhadap adalah keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera 1. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 indikator yang meliputi:

1) Indikator Ekonomi

- Makan dua kali atau lebih dalam sehari
- Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan berpergian)
- Bagian terluas lantai bukan dari tanah.

2) Indikator Non-Ekonomi

- Melaksanakan ibadah
- Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

1) Indikator Ekonomi

- Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging, ikan atau telur
- Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru
- Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni

2) Indikator Non-Ekonomi

- Ibadah teratur
- Sehat tiga bulan terakhir
- Punya penghasilan tetap
- Usia 10-60 tahun mampu membaca dan menulis
- Usia 6-15 tahun bersekolah
- Anak lebih dari dua orang, ber-KB.

Keluarga pra sejahtera dan Sejahtera I di Kabupaten Kepulauan Meranti jumlahnya sedikit yaitu hanya 33,36% pada tahun 2011 yang tercatat pada buku system informasi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015. Jumlah tersebut sangat baik jika dilihat dari segi pembangunan, karena nilainya yang kecil sehingga kedepannya tidak menjadi beban pembangunan. Diharapkan pada tahun-tahun kedepannya pemerintah daerah dapat lebih memperkecil persentase Keluarga pra sejahtera dan Sejahtera I dengan program peningkatan kesejahteraan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2010-2015 terlihat pada Tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsos PPPA KB Kabupaten Meranti Tahun 2010-2015
(Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	1,335,238,130	830,190,200	967,041,200	1,439,111,600	1,520,221,650	1,035,000,000	664,152,160	853,727,710	1,320,894,134	1,341,722,154	77.51	80.00	88.28	91.79	88.26
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	606,928,680	141,918,820	685,679,340	551,468,050	687,314,050	546,235,812	113,535,056	654,721,800	541,550,793	647,111,000	90.00	80.00	95.49	98.20	94.15
3	Program peningkatan disiplin aparatur	32,400,000	32,000,000	11,000,000	14,500,000	29,750,000	29,160,000	25,600,000	11,000,000	14,500,000	29,668,000	90.00	80.00	100.00	100.00	99.72
5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	45,660,000	80,860,000	145,310,000	77,970,000	0	41,094,000	64,688,000	75,440,000	53,760,000	0	90.00	80.00	51.92	68.95	0.00
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	44,400,000	53,023,450	75,000,000	0	7,975,000	39,960,000	42,418,760	39,523,000	0	7,119,000	90.00	80.00	52.70	0.00	89.27
	Urusan Sosial						-	-								
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang	1,149,487,780	2,890,188,900	3,248,242,200	3,230,813,600	1,859,880,500	-	-	3,151,683,000	2,831,422,000	1,482,072,700	0.00	0.00	97.03	87.64	79.69

RENCANA STRATEGIS

	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)																
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	529,911,700	1,048,523,400	750,595,900	1,107,322,900	468,732,000	-	-	694,033,650	942,382,100	308,930,000	0.00	0.00	92.46	85.10	65.91	
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	-	-	-	50,840,000	15,000,000	-	-	-	50,040,000	-	0.00	0.00	0.00	98.43	0.00	
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	89,148,000	1,767,952,000	4,841,713,000	6,641,338,700	6,161,335,200	-	-	4,593,607,238	6,367,648,500	1,669,884,000	0.00	0.00	94.88	95.88	27.10	
5	Program Pengembangan Perumahan	-	-	180,315,000	-	-	-	-	179,975,000	-	-	0.00	0.00	99.81	0.00	0.00	
6	Pembangunan / Pemeliharaan Tempat Pemakaman Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum	100,420,000	-	-	-	-	99,842,000.00	-	-	-	-	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kepulauan Meranti pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah PMKS masih tinggi namun penanganannya belum maksimal
- b. Peran serta PSKS dan dunia usaha dalam penanganan PMKS
- c. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- d. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan termasuk TPPO terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- f. Munculnya berbagai pengaruh dari media sosial sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan oleh perempuan dan anak dalam mengendalikan kualitas kehidupan;
- g. Perkembangan IT yang sangat cepat menuntut penyediaan data berbasis IT yang harus dipenuhi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkoneksi dengan pemerintah Provinsi Riau;

- h. Adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan, dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak.
- i. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program KB
- j. Adanya anggapan bahwa perempuan yang harus mengikuti program KB sementara laki – laki tidak perlu ber KB
- k. Penguatan kapasitas SDM PKB dan PLKB dalam memberikan penyuluhan KB kepada masyarakat
- l. Masih kurangnya Tribina, IMP, dan PIK-R yang terbentuk.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kepulauan Meranti pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Sila Kelima Pancasila yang mengamanatkan tentang Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. UU 23 tahun 2014 mengamatkan tentang pembagian urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar serta sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota sehingga memudahkan penanganan PMKS yang menjadi target nasional maupun target pemerintah daerah dalam pembangunan;
- c. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan pemberdayaan

dan pelayanan terhadap PMKS dan PSKS serta kesetaraan gender dan program KB di daerah.

- d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya kinerja pelayanan publik	rendahnya kinerja pelayanan aparatur	masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur
			akuntabilitas kinerja dan keuangan
			minimnya jumlah SDM Aparatur pelaksana Pelayanan
2	Masih Tingginya Angka PMKS	Masih Rendahnya peran aktif PSKS	jumlah SDM PSKS yang masih kurang
		cakupan penanganan PMKS masih rendah	masih kurangnya jumlah SDM dan sarana prasarana penanganan PMKS di daerah
3	Masih tingginya Angka Kemiskinan	data kemiskinan yang belum valid	terdapat perbedaan data kemiskinan
		penanganan kemiskinan yang belum terintegrasi	belum adanya program penanganan kemiskinan terpadu dan terintegrasi
		pemberdayaan KAT yang belum maksimal	masih terdapat perbedaan cara pemberdayaan KAT antara pemerintah daerah dengan

			pemerintah provinsi maupun pusat
4	Masih tingginya angka kelahiran	CPR KB aktif masih rendah	masih kurangnya penyuluhan kepada masyarakat khususnya PUS
		masih rendahnya IMP aktif	kompetensi SDM IMP yang masih rendah
		rasio PKB dan PLKB yang masih sedikit	jumlah tenaga PKB dan PLB masih sedikit karena masih sulitnya SDM yang memiliki kompetensi
5	Masih rendahnya capaian IPG dan IDG	rendahnya PUG aktif	kurangnya pengetahuan tentang Pengarustamaan gender
		masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya konsisten dengan dokumen tingkat daerah, provinsi, maupun tingkat nasional, sehingga capaian yang diperoleh belum selaras dengan tujuan dan sasaran dari Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti;
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Capaian IPG Kabupaten Kepulauan Meranti relatif rendah, tahun 2015 IPG Kabupaten Kepulauan Meranti baru mencapai 84,12;
- 2) Capaian IDG rendah Kabupaten Kepulauan Meranti relatif rendah, tahun 2015 IDG Kabupaten Kepulauan Meranti baru mencapai 64,55;
- 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Kepulauan Meranti relatif rendah yaitu 16 %;
- 4) Capaian pendapatan kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga di kabupaten Kepulauan Meranti relatif rendah, yaitu kurang dari 30%;
- 5) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten/kota, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO terus meningkat dari tahun ke tahun;
- 6) Maraknya media sosial, menjadikan perempuan dan anak sebagai obyek tontonan vulgar, pornografi, penetrasi media, sehingga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan termasuk TPPO;
- 7) Belum optimalnya peran lembaga perlindungan hak perempuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari upaya perlindungan hak-hak perempuan, hal ini ditunjukkan dari rendahnya kinerja penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 8) Belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak anak sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam UU perlindungan anak nomor 35 tahun 2014;
- 9) Belum semua anak memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan baik fisik, non fisik, penelantaran seperti pekerja anak perkawinan anak, kekerasan terhadap anak dan anak

berhadapan dengan hukum (ABH);

- 10) Aksesibilitas terhadap media sosial telah mengakibatkan dampak buruk yaitu meningkatnya tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
 - 11) Meningkatnya kasus anak-anak yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, akibat penelantaran baik secara fisik maupun psikis, sehingga mengakibatkan anak-anak tidak mampu tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak lain yang sudah mendapatkan perlindungan;
 - 12) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak dikabupaten kota se Provinsi Riau.
 - 13) Belum dimilikinya sistem data gender dan anak, serta belum digunakannya data gender dan anak sebagai bahan dalam perencanaan penganggaran oleh Perangkat Daerah diluar Dinas PPPA;
- c. Permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
- 1) Belum optimalnya pengendalian terhadap kelahiran, dan migrasi penduduk antar wilayah;
 - 2) Tingginya PUS yang harusnya berKB namun tidak berKB (*unmet need*);
 - 3) Rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber-KB yaitu kurang dari 5 % dari jumlah aseptor KB;
 - 4) Belum optimalnya kelembagaan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam membangun kualitas keluarga yang sejahtera;
- d. Permasalahan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
- 1) Rendahnya cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan

- dan rehabilitasi sosial;
- 2) Belum optimalnya penanganan bencana sosial akibat rendahnya kualitas jaringan dalam penanganan bencana.
 - 3) Rendahnya SDM profesional dalam penanganan rehabilitasi sosial bagi PMKS
 - 4) Minimnya fasilitas berupa sarana prasarana rehabilitasi sosial
- e. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- 1) Masih tingginya penduduk yang menyandang PMKS yaitu sebesar 14.563 jiwa;
 - 2) Masih sedikit PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PMKS di daerah;
 - 3) Belum optimalnya pemberdayaan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) di daerah;
 - 4) Belum validnya data fakir miskin, dan PMKS skala kabupaten.
 - 5) Pengelolaan TMP yang belum maksimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021

Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah ***Menjadikan Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga Yang Maju Dan Unggul Dalam Tatanan Masyarakat Madani.***

Unsur visi tersebut adalah ***Kawasan Niaga, Maju dan Unggul*** serta ***Masyarakat Madani.*** Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial PPPAPKB adalah unsur masyarakat madani.

Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradap, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana pemerintahannya lebih demokratis, memberi peluang seluas-luasnya bagi kreatifitas warganya untuk mewujudkan program-program pembangunan diwilayahnya. Agama Islam yang merupakan agama mayoritas di wilayah ini dijadikan landasan norma kemasyarakatan untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan dan menjaga kerukunan hidup dengan umat beragama lain.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan **7 (tujuh) Misi** sebagai berikut:

1. **MENINGKATKAN PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KHARIMAH.** Misi ini ingin menciptakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi masyarakat yang religius, berakhlak mulia, bermoral, memiliki toleransi yang tinggi serta menjaga kerukunan antar umat beragama.
2. **MEWUJUDKAN KAWASAN NIAGA.** Misi ini ingin mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki komoditas perniagaan dan pusat – pusat perniagaan.
3. **MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT.** Misi ini ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, berkarya, inovatif, kompetitif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta sehat jasmani dan rohani.

4. **MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN.** Misi ini ingin mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi pemerintahan yang profesional dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang handal, transparan dan akuntabel, terpercaya dalam memberikan pelayanan, sistem yang modern berbasis ilmupengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*).
5. **MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN POTENSI DAERAH.** Misi ini ingin menjadikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang sejahtera, maju dan mandiri dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan produk unggulan daerah dan pengembangan kawasan niaga.
6. **MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN OPTIMALISASI PENATAAN RUANG.** Misi ini ingin mewujudkan peningkatan aksesibilitas dengan penyediaan infrastruktur dasar serta meningkatkan konektivitas inter dan antar pulau. Misi ini juga ingin mencapai optimalisasi dalam pemanfaatan penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. **MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.**

Misi ini ingin mewujudkan peningkatan standar kualitas lingkungan hidup dengan mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial PPPA PPKB Kabupaten Meranti mendukung pencapaian misi 3 dan 4 yaitu :

1. Misi 4 yaitu Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien;

2. Misi 5 yaitu Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah;

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinsos PPPAPPKB adalah sebagai berikut:

1. Misi 4

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih (*clean goverment*);
- 2) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*)

3) Meningkatkan pelayanan pemerintah yang baik

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
- 3) Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur;**

2. Misi 5

a. Tujuan :

1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

- 2) Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja
- 3) Meningkatkan jumlah produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
- 4) Meningkatkan Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM)
- 5) Meningkatkan investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti

b. Sasaran :

1) Menurunnya jumlah penduduk miskin

- 2) Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

- 3) Meningkatnya jumlah produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
- 4) Meningkatnya Koperasi dan IKM di Kabupaten Kepulauan Meranti
- 5) Meningkatnya investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Meranti tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian
Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti
2016-2021

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi Keempat : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien</p> <hr/> <p>Tujuan: Meningkatkan pelayanan pemerintah yang baik</p> <hr/> <p>Sasaran: Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan informasi public 2. masih rendahnya nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. belum optimal Belum optimalnya kualitas pelayanan dan informasi public 2. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah. 3. Kualitas dokumen perencanaan dan Akuntabilitas capaian kinerja perangkat daerah sesuai peraturan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. adanya komitmen Kepala daerah 2. Semakin Membaiknya paradigm ASN dalam pelayanan Publik 3. Semakin mudahnya akses informasi kepada masyarakat 4. Semakin membaiknya keterbukaan laporan keuangan

3	Misi Keempat : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah	1. Masih Tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah	1. Kompetensi SDM masih belum optimal 2. Belum tersedianya data yang akurat 3. Dukungan dana operasional belum optimal 4. rendahnya peran serta sektor swasta dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Miskin dan PMKS lainnya. 5. minimnya dukungan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	1. Adanya Komitmen Pemerintah Daerah 2. Koordinasi yang baik antar Unit Organisasi 3. Kemudahan akses informasi Kesejahteraan social 4. Semakin baiknya Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi terhadap kejadian tanggap darurat bencana 5. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2. Belum optimalnya Pemberdayaan Sosial skala kabupaten ditandai dengan belum optimalnya pemberdayaan KAT, PSKS dan LK3 kabupaten	2. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. 3. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	
	Sasaran : Menurunnya jumlah penduduk miskin	3. Masih banyaknya masyarakat miskin dan KAT yang belum memiliki pemukiman yang layak 4. Belum optimalnya penanganan darurat bencana (bantuan pemenuhan kebutuhan pokok) dan pemulihan dampak bencana. 5. Rendahnya capaian IPG dan IDG 6. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT 7. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak 8. Masih tinggi nya angka Keluarga kategori KS I dan II	2. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. 3. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 6. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau, DPPA Provinsi Riau, Dinas Pengendalian Penduduk dan catatan sipil Provinsi Riau

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

A. Tujuan

Tujuan akhir yang akan dicapai Kementerian Sosial tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah:

1. Meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar
2. Terpenuhinya hak dasar dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya
3. Meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2015-2019 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019, melalui indikator :
 - a. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya yang

meningkatkan kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitasnya.

2. Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social, melalui indikator:
 - a. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya;
 - b. Persentase (%) Lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Renstra Kementerian Sosial tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019	1. Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas.	1. Jumlah fakir miskin yang banyak 2. Terbatasnya kuota bantuan dari program-program pemerintah	1. Komitmen kepala daerah dalam mengentaskan kemiskinan 2. Hadirnya program-program baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk penanganan PMKS

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Meningkatnya kapasitas SDM dan lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS. 2. Banyaknya PSKS yang tidak aktif. 3. Kapasitas daya tanggap panti sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi di panti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang masih belum begitu aktif 2. Fungsi dan tugas masing-masing SDM masih belum jelas 3. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah PSKS yang bertambah (Tagana, Unit Reaksi Cepat, Sakti Peksos, PSM dan TKSK) 2. Terdapat beberapa kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas PSKS 3. Setiap tahun di anggarakan bantuan untuk Panti-Panti Sosial

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian PPPA tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender	- Rendahnya IPG dan IDG	- Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. - Terbatasnya anggaran program	- Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatkan capaian indeks			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemberdayaan gender		untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia. b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	- Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak - Belum terpenuhinya hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus	- Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

3.3.3. Telaah Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019

Renstra BKKBN 2015-2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/PER/BI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Renstra ini pada tahun 2016 telah dilakukan revisi dan ditetapkan dengan peraturan Kepala BKKBN Nomor 199 Tahun 2016 Tanggal 15 September 2016.

Revisi Renstra tersebut tidak merubah sasaran dan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan, revisi lebih diarahkan untuk mempertajam strategi pelaksanaan Program

Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun garis besar Renstra tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2015-2019, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas”.

b. Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019.

Sasaran strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome* dari beberapa program. Bentuk penjabaran tujuan strategis tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN

menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019

INDIKATOR		BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/ TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,60	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28	2,28
2	Persentase pemakaian kontrasepsi (<i>modern contraceptive prevalence rate/ CPR</i>)	57,9	60,5	60,7	60,9	61,1	61,3	61,3
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) (%)	11,4 (8,6)	10,60	10,48	10,26	10,14	9,91	9,91
4	Persentase Peserta KB Aktif (PA) MKJP	18,3	20,50	21,19	21,70	22,30	23,50	23,50
5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	27,1	26,0	25,7	25,3	25,0	24,6	24,6

Sumber : Rencana Strategis BKKBN

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Merantiberdasarkan Sasaran Renstra BKKBN beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)	Masih tingginya angka kelahiran penduduk dan migrasi penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program pengendalian penduduk 	Komitmen Nasional dan kepala daerah dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi (CPR) modern	Advokasi dan KIE yang belum efektif	Tersediannya anggaran untuk mengadvokasi masyarakat dalam penggunaan CPR modern
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Masih tingginya Unmetneed	Masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB	Adanya dukungan kebijakan dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1. Rendahnya pengguna alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Rendahnya minat masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) terus meningkat	Tersedianya sarana prasarana alat dan obat MKJP

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tujuan dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau adalah :

1. Terwujudnya efektifitas penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Terwujudnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, lanjut usia non potensial, bekas penderita penyakit kronis, dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
3. Terwujudnya kemitraan dan aktualisasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang melembaga dalam penanganan PMKS;

4. Terwujudnya jaminan sosial serta perlindungan sosial bagi korban bencana dan masyarakat rentan resiko sosial;
5. Terpeliharanya nilai nilai kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial serta terealisasinya penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
6. Terwujudnya pelayanan sosial melalui panti di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau yang lebih baik ;
7. Tersedianya sumber daya manusia bidang sosial serta sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pembangunan kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Dinas Sosial yang ingin dicapai adalah:

1. Terberdayakannya fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainnya;
2. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial, anak, lanjut usia, penyandang cacat dan Napza;
3. Meningkatnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan permasalahan sosial;
4. Terjalinnya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial di daerah;
5. Terlayaninya bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTKPM), korban bencana alam dan sosial, dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau tercantum pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<ul style="list-style-type: none"> • Terberdayakannya fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS lainnya; • Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial, anak, lanjut usia, penyandang cacat dan Napza; • Meningkatnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial dalam penanganan permasalahan sosial; • Terjalannya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial di daerah; • Terlayannya bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (KTKPM), korban bencana alam dan sosial, dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya cakupan PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga; • Belum optimalnya penanganan bencana sosial akibat rendahnya kualitas jaringan dalam penanganan bencana. • Masih tingginya penduduk yang menyandang PMKS • Banyaknya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas dan belum terkoordinasi antar perangkat daerah diuar dinas Sosial PPPAPKB 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah fakir miskin yang banyak • Terbatasnya kuota bantuan dari program-program pemerintah • SDM yang masih belum begitu aktif • Fungsi dan tugas masing-masing SDM masih belum jelas • Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen kepala daerah dalam mengentaskan kemiskinan • Hadirnya program-program baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk penanganan PMKS • Jumlah PSKS yang bertambah (Tagana, Unit Reaksi Cepat, Sakti Peksos, PSM dan TKSK) • Terdapat beberapa kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kualitas PSKS • Setiap tahun di anggarakan bantuan untuk Panti-Panti Sosial

3.3.5 Telaahan Renstra Dinas PPPA Provinsi Riau

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Merantimendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas PPPA Provinsi Riau yang terkait dengan pelayanan urusan PPPA, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, pelayanan, pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan TPPO. Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang.
2. Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan. Sasaran yang dicapai adalah meningkatnya penguatan kelembagaan PUG dalam pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Sasaran yang dicapai yaitu meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas dokumen perencanaan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kualitas dokumen perencanaan.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran Renstra Dinas PPPA Provinsi Riau tercantum pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Dinsos PPPA PPKB Kabupaten
Meranti
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas PPPA Provinsi Riau beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, pelayanan, pemberdayaan perempuan korban kekerasan dan TPPO. Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang. • Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan. Sasaran yang dicapai adalah meningkatnya penguatan kelembagaan PUG dalam pembangunan. • Meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Sasaran yang dicapai yaitu meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas dokumen perencanaan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kualitas dokumen perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya IPG dan IDG • Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO • Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

3.3.6 Telaahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil Provinsi Riau

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1 yaitu meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran; Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Data Basis Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui optimilisasi sistem informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
2. Tujuan 2 yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dibidang pendaftaran penduduk Sasarannya :
 - a. Tersedianya tempat perekaman data kependudukan;
 - b. Meningkatnya kesadaran penduduk kabupaten bogor akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan.
 - c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan kependudukan
 - d. Terpenuhinya data statistik mengenai peristiwa kependudukan
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur dibidang pencatatan sipil dan meningkatkan pelayanan pencatatan sipil dengan sasaran Sasaran:
 - a. Meningkatnya standar pelayanan akta catatan sipil
 - b. Berkurangnya kasus kepemilikan akta palsu
 - c. Meningkatnya jumlah kepemilikan akta
 - d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam pembuatan akta catatan sipil;
 - e. Terwujudnya sistem pencatatan sipil yang handal.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil Provinsi Riau tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8
Permasalahan Pelayanan Dinsos PPPA KB Kabupaten Meranti

berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil Provinsi Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Tujuan 1 yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur dibidang pendaftaran penduduk. Sasarannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya tempat perekaman data kependudukan; • Meningkatnya kesadaran penduduk kabupaten bogor akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. • Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan kependudukan • Terpenuhinya data statistik mengenai peristiwa kependudukan 	Masih tingginya angka kelahiran penduduk dan migrasi penduduk	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga • masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program pengendalian penduduk 	Komitmen Nasional dan kepala daerah dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk

3.3.7. Telaahan Renstra BKKBN Provinsi Riau

Sasaran strategis BKKBN Provinsi Riau Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP);
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun);
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need);
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun);

6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran BKKBN Provinsi Riau tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Permasalahan Pelayanan Dinsos PPPA KB Kabupaten Meranti berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil Provinsi Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Sasaran strategis BKKBN Provinsi Riau Tahun 2015-2019 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP); • Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun); • Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR); • Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need); • Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun); • Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya unmet need • Rendahnya cakupan dalam ber KB • Rendahnya partisipasi KB pria. 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dalam keluarga • masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder s terhadap program pengendalian penduduk • Partispasi PUS dalam ber KB rendah 	<p>Komitmen Nasional dan kepala daerah dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan cakupan KB tinggi.</p>

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan, oleh karena itu tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD).

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;
2. Masih rendahnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Rendahnya keberdayaan dalam PUG;
4. Rendahnya kualitas hidup perempuan yang ditandai oleh rendahnya keterlibatan perempuan di legislatif dan kontribusi

pendapatan perempuan dalam keluarga yang dicapai oleh kabupaten/kota;

5. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO serta rendahnya peran lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO;
6. Belum optimalnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
7. Akses dan Kualitas Pelayanan KB masih rendah
8. Belum optimalnya kelembagaan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam membangun kualitas keluarga yang sejahtera.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan yang akan ditempuh dalam lima tahun adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan pemerintah yang baik dengan Indikator Tujuan:
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Indikator Tujuan:
 - a. Angka Kemiskinan

Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan jangka Menengah Dinas SOSP3AP2KB

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Awal	TARGET KINERJA SASARAN				
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	70	80	85	90	90
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka kemiskinan	30,89	28,99	27,60	25,05	23,82	20,97

4.2 Sasaran

Sasaran yang akan ditempuh dalam lima tahun adalah :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya penanganan terhadap PMKS dengan indikator sasaran:

-
- a. Persentase PMKS yang tertangani
 3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dengan indikator sasaran:
 - a. Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
 - b. Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial
 4. Menurunnya Angka Kelahiran Total
 - a. Angka Kelahiran Total (TFR)

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2016 – 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	70	80	85	90	90
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Angka kemiskinan	30,89	28,99	27,60	25,05	23,82	20,97
		Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	N/A	50	55	60	65	70
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	N/A	0.175	0.232	0.289	0.346	0.403
			Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	N/A	53	55	57	59	61
		Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,37	2,36	2,35	2,33	2,31	2,28

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan upaya apa aja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran misi dalam wujud strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan menjadi pedoman dan akan menuntun untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efisien dan efektif.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategis membutuhkan kestuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strenght, weakness, oppuortunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor intenal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1 : Analisis SWOT berdasarkan isu – isu strategis daerah

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan (<i>strenght</i>)	Peluang (<i>oppornity</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komitmen apatur dalam Menjalankan fungsi OPD 2. Makin membaiknya akuntabilitas kinerja aparatur 3. Terbangunnya koordinasi yang baik di setiap tingkatan unit kerja 4. Semakin bertambahnya Peksos Profesional dalam penanganan PMKS 5. Sudah terbentuknya Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak 6. Tren Peningkatan angka KB Aktif 7. Dukungan Teknologi Informasi yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan program NAWACITA 2. Masyarakat Ekonomi Asean 3. Dukungan kebijakan penanganan PMKS dari pemerintah pusat 4. Komitmen Kepala Daerah 5. Dukungan program KL teknis dalam penanganan masalah di daerah 6. Partisipasi masyarakat yang semakin membaik 7. Tingkat kemiskinan menunjuk kan tren menurun 8. Semakin membaiknya keterbukaan informasi di masyarakat
Kelemahan (<i>weakness</i>)	Ancaman (<i>threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka PMKS masih tinggi 2. Cakupan Penanganan PMKS masih rendah 3. rehabilitasi PMKS belum maksimal 4. Akses, fasilitas, dan sistem pelayanan rehabilitasi yang masih rendah 5. Akses terbatas dan daerah terisolir 6. Belum optimalnya pelayanan publik 7. Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja aparatur dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah 8. Terbatasnya anggaran daerah 9. Pembinaan PSKS belum maksimal 10. Kualitas dan kuantitas SDM PLKB masih minim 11. Minimnya sarana pendukung lembaga perlindungan perempuan dan Anak 12. Belum adanya Sistem Pengelolaan data terpadu di OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis kepulauan menyebabkan biaya pembangunan yang besar 2. Minimnya dukungan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi 3. Produksi dan harga pasar migas menurun 4. Belum akuratnya data kemiskinan, dan PMKS, 5. Maraknya peredaran NARKOBA 6. Rendahnya peran serta sektor swasta dalam perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Miskin dan PMKS lainnya. 7. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program KB

Tabel 5.2. Penentuan Alternatif Strategi

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI
Tujuan I: Meningkatkan pelayanan pemerintah yang baik			
1.1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Aparatur	1.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Administrasi Pelayanan • Peningkatan Kapasitas dan SDM Aparatur • Peningkatan Disiplin Aparatur • Peningkatan Sarana prasarana Aparatur • Implementasi akuntabilitas kinerja aparatur
Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
2.1	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	2.1.1. Persentase PMKS yang tertangani	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Kelembagaan PSKS • Peningkatan Kualitas SDM PSKS • Pendampingan sarana prasarana PSKS • Pengelolaan TMP • Penyediaan Operasional bagi PSKS
<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan fakir miskin dan KAT • Pemberian bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi korban kebakaran • Pelayanan Rehabilitasi bagi PMKS di luar panti • Pelayanan Reabilitasi bagi eks PSK, NAFZA, • Pelayanan perlindungan dan jaminan Sosial keluarga • Pendampingan Program Keluarga harapan • Pembinaan Anak Terlantar • Pembinaan Penyandang Cacat • Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan dan PMKS Kabupaten. 			
2.3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan	2.3. Prevalansi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI
	perlindungan anak		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan SDM Lembaga Perlindungan perempuan dan Anak • Pembentukan Satgas P2TP2A • Rumusan Kebijakan perlindungan perempuan dan Anak • Penyusunan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak • Pembinaan Forum Anak • Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja • Penyuluhan Bahaya narkoba bagi Perempuan dan Anak • Pembinaan kreatifitas Anak • Peningkatan capaian Kabupaten Layak Anak
		2.4. Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Organisasi wanita • Pelatihan Keterampilan wanita • Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu • Sosialisasi Gender • Pembinaan Kelembagaan PUG • Pembinaan Manajemen Usaha Bagi perempuan • Pelatihan PPRG bagi OPD • Pendidikan Politik bagi perempuan • Pembinaan UP2K • Pembinaan Peran Perempuan Menuju keluarga Sehat dan Sejahtera • Pembinaan Perempuan dalam Pengambilan keputusan

NO.	KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALTERNATIF STRATEGI
2.5.	Menurunnya Angka Kelahiran total (TFR)	2.5.1. Angka Kelahiran Total (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pelayanan KB Pria • Penyediaan Sarana Pendataan KB • Penyediaan Sarana Petugas Lapangan KB • Peningkatan Kualitas penyuluhan Keluarga Berencana • Peningkatan pelayanan distribusi ALKON • Penyuluhan langsung kepada masyarakat • Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh KB • Peningkatan kelembagaan kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) • Peningkatan Kelembagaan PPKBD dan Sub-PPKBD • Penguatan kelembagaan kenseling (PIK-R) • Penyusunan kebijakan Pengendalian Kependudukan

5.2 Arah Kebijakan

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Dinsos PPPA KB Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021

VISI	: MENJADIKAN KEPULAUAN MERANTI SEBAGAI KAWASAN NIAGA YANG MAJU DAN UNGGUL DALAM TATANAN MASYARAKAT MADANI		
MISI IV	: Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 1			
Meningkatkan Pelayanan pemerintah yang baik	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan Prima	Peningkatan kinerja Pelayanan Prima dengan fokus peningkatan SDM Aparatur, administrasi perkantoran, sarana prasarana dan Disiplin Aparatur
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja melalui peningkatan SDM Aparatur, pemenuhan dokumen dan MONEV internal	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan kinerja dengan fokus monitoring dan evaluasi data data pendukung
MISI V	: Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan potensi Daerah		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
TUJUAN 2			
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Meningkatkan peran aktif PSKS melalui pemberdayaan dan pembinaan kelembaganaan sosial	Peningkatan peran aktif PSKS dengan fokus peningkatan capacity building

		Meningkatkan Penanganan PMKS melalui upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap PMKS	Peningkatan Penanganan PMKS melalui upaya perlindungan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar terhadap PMKS dengan fokus peningkatan pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan, pembinaan penyandang disabilitas dan penyandang eks NAFZA, PSK dan Penyakit sosial lainnya.
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan perlindungan dan anak	Memperkuat lembaga/jejaring PUG untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.	Penguatan Pokja PUG di Kabupaten, serta penguatan ARG di setiap OPD
		Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan melalui Penguatan lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan anak dengan fokus pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan fokus peningkatan kualitas SDM dan Lembaga Layanan
	Menurunnya Angka Kelahiran	Meningkatkan Peserta KB Aktif Melalui penguatan lembaga dan jaringan kader KB	Penguatan Lembaga dan Jaringan Kader KB dengan Fokus sosialisasi, penyaluran ALKON, Penyuluhan, dan Pembinaan
		Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Institusi Masyarakat Pedesaan, poktan	Peningkatan partisipasi masyarakat dengan fokus pembinaan kelompok Tribina, UPPKS, PPKBD dan Sub PPKBD
		Penguatan kebijakan pengendalian penduduk	Penguatan kebijakan pengendalian penduduk dengan fokus kajian dan kebijakan pengendalian penduduk

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3. Penyediaan Barang Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
4. penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor
6. penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak Dan Penggadaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Makan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
15. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
5. Penambahan Ruang Gedung Kantor/Pembuatan Partisi Gedung Kantor
6. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7. Pengadaan Meubilier
8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
10. pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Kelengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang undangan

E. Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA)
2. Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) OPD
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD
4. Penyusunan Dokumen SAKIP OPD
5. Penyusunan Profil OPD
6. Pengelolaan Website Dinas
7. Penyusunan SOP OPD
8. Penyusunan Dokumen SPIP OPD
9. Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
10. Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan

F. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha
2. Peningkatan peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha untuk kelompok Masyarakat (Bantuan Mesin Jahit untuk Kelompok Masyarakat Miskin)
3. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
4. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
5. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat
6. Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
7. Pembinaan Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti
8. Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Kepulauan Meranti
9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Serikat Kematian kab. Kepulauan Meranti
10. Pembinaan WKSBM
11. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

G. Program Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial

1. Pelayanan dan penyantunan bagi perintis dan janda perintis kemerdekaan
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala TMP Bunga Bangsa Selatpanjang
3. Pelaksanaan Apel Kehormatan Renungan Suci (AKRS) / Ziarah TMP Bungan Bangsa Dalam Rangka Hari Besar Nasional, Hari Besar Nasional, 17 Agustus

4. Pelaksanaan Apel Kehormatan Renungan Suci (AKRS) / Ziarah TMP Bungan Bangsa Dalam Rangka Hari Besar Nasional, Hari Pahlawan 10 November
5. Pelaksanaan Acara Pemberian Grasi, Remisi dan Amnesty Di Rutan Selatpanjang dalam Rangka Hari Besar Nasional, 17 Agustus
6. Pelaksanaan Apel Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSAN Kepulauan Meranti
7. Bakti Sosial dalam Rangka memperingati hari kesetiakawanan social
8. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional

H. Program Pemberdayaan fakir Miskin dan KAT

1. Monitoring Evaluasi manajemen usaha bagi Keluarga Miskin
2. Rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman bagi kelompok keluarga Fakir Miskin (FM)
3. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
4. Pembangunan Balai Adat KAT Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Bedah Rumah Masyarakat Fakir Miskin
6. Pelatihan Petugas Lapangan Verifikasi dan Validasi data Kemiskinan
7. Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT)
8. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Kepulauan Meranti
9. Pemetaan Sosial Komunitas Adat Terpencil(KAT)
10. Rakor dan Sosialisasi Pendistribusian Pangan Raskin Ke Rumah Tangga Sasaran (RTS)
11. Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT)
12. Pendistribusian Pangan RASTRA Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

13. Revitalisasi Kelembagaan Musyawarah Desa (Mudes) dalam pengendalian Pelaksanaan Program Rastra
14. Semiloka Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Kepulauan Meranti
15. Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan (PASK) Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Kepulauan Meranti

I. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1. Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana
2. Peningkatan Pelayanan Pengiriman Pasien Psykosis Ke PSBL Bengkulu
3. Pengiriman dan Bantuan Sosial Klien
4. Peningkatan Kualitas pelayanan,sarana dan Prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS
5. Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal
6. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)
7. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Buruh Migran tindak Kekerasan
8. Peningkatan Pelayanan Bantuan Lansia Terlantar
9. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
10. Pelatihan Keterampilan bagi Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
11. Peningkatan Pelayanan Rahabilitasi Korban Napza
12. Peningkatan Kualitas pelayanan,sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS
13. Pelayanan dan Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)

J. Program pembinaan eks Penyandang penyakit social (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social lainnya)

- Pembinaan eks Penyandang penyakit Sosial

K. Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma

1. Bantuan Peralatan Usaha Bagi Penyandang Cacat
2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

L. Program Perlindungan Jaminan Sosial Keluarga

1. Sosialisasi Program Keluarga Harapan
2. Pendamping Program Keluarga Harapan
3. Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan
4. Monitoring Evaluasi Pelaporan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)

M. Program Penyuluhan Sosial

1. Peningkatan Penyuluhan Sosial di 9 Kecamatan
2. Monitoring dan Evaluasi Program Penyuluhan Sosial

N. Program Rehabilitasi Korban Bencana

1. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa/ (Bantuan Bagi korban Bencana Alam dan Bencana)
2. Fasilitasi bantuan Sosial Korban bencana Alam/ Bencana Sosial

O. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Gender Dalam Pembangunan

1. Pembinaan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Pembinaan Organisasi Perempuan Kabupaten Kepulauan Meranti

3. Kegiatan Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5. Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)
6. Peningkatan Capacity Building Pengurus Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Penguatan Kelembagaan UP2K
8. Lomba UP2K Kabupaten Kepulauan Meranti
9. Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)

P. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak

1. Peningkatan Kapasitas Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Advokasi PUG bagi Perempuan
3. Pemetaan dan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak
4. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
6. Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
7. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
8. Pemberdayaan lembaga yang berbasis Gender
9. Pengembangan system informasi gender dan anak
10. Seminar upaya pencegahan narkoba dan tindak kekerasan bagi anak
11. Lomba Kreasi Anak
12. Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja
13. Pembinaan Kelompok Peduli KDRT

14. Kabupaten Layak Anak
15. Penyusunan Naskah Akademik Perda Perlindungan Perempuan
16. Pengembangan Kapasitas SDM Konvensi HAK Anak(KHA)
17. Advokasi Pencegahan dan Penangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
18. Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti
19. Penyuluhan antisipasi dini pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
20. Pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Q. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Penguatan Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Pelatihan Bagi pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendamping Korban KDRT
3. Pelaksanaan upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
4. Pembentukan Satgas P2TP2A di Kecamatan
5. Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)
6. Kecamatan Ramah Anak

R. Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan Perempuan

1. Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Kajian Akademik peraturan daerah (Perda) Perlindungan perempuan

3. Kajian Akademik Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak
4. Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti

S. Program Keluarga Berencana

1. Pembinaan dan Pelatihan Kader Tribina
2. Penyediaan jasa petugas lapangan keluarga Berencana (PLKB) Kab. Kep. Meranti
3. Penyusunan Grand Desain Pengendalian Penduduk Kab. Kepulauan Meranti
4. Advokasi Dokumen Grand Desain Pengendalian Penduduk dan Penetapan Parameter Kependudukan
5. Penggarapan KB di Wilayah Sasaran Khusus dan GALCITAS
6. Sosialisasi dan Fasilitasi Operasi Medis bagi Calon Peserta KB MOP/ MOW
7. Pertemuan Peningkatan Peran Dokter dan Bidan Praktek Mandiri dalam Penguatan Pelayanan KKB MKJP
8. Pembangunan/Alih Fungsi Balai Penyuluhan KB (DAK FISIK)
9. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK FISIK)
10. Pengembangan Balai Penyuluhan KB (DAK FISIK)
11. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) DAK Non Fisik
12. Pelaporan dan Pengelolaan data dan informasi Program KB
13. Advokasi dan Fasilitasi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Bagi Tenaga Kesehatan

T. Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Penyediaan Pelayanan KB melalui TNI KB Kesehatan
2. Penyediaan Pelayanan KB melalui PKK KB Kesehatan
3. Penyediaan Pelayanan KB melalui IBI KB Kesehatan
4. Penyediaan Pelayanan KB melalui Bhayangkari KB Kesehatan
5. Distribusi Alat Kontrasepsi dan Obat Kontrasepsi

6. Penyediaan Peralatan dan Pemeliharaan Gedung Alat Kontrasepsi dan Obat Kontrasepsi
7. Penyediaan Pelayanan KB

U. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1. Pembinaan dan Pelatihan Kader PPKBD/ Sub PPKBD
2. Orientasi Program KKBPK bagi TOMA/TOGA/, LSOM dan Mitra kerja
3. Penyediaan Sarana Kerja PPKBD/ Sub PPKBD
4. Fasilitasi AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS)
5. Pelatihan Pengelolaan Kelompok UPPKS
6. Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB
7. Pembinaan Kelompok UPPKS (Asosiasi Kelompok UPPKS) se-Kabupaten
8. Peringatan Hari Keluarga Nasional

V. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

1. Fasilitasi Pembentukan BKB Holistik Integratif (BKB-Posyandu-PAUD)

W. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Pelatihan PIK-R/M Jalur Sekolah/ Masyarakat
2. Ajang Prestasi Remaja
3. Pembentukan PIK-R/M Jalur Sekolah/ Masyarakat

X. Program Pengembangan Pusat Pelayanan informasi dan Konseling KRR

1. Fasilitasi Forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Y. Program Pengendalian Penduduk

1. Pelaksanaan Analisis Dampak Kependudukan terhadap Pembangunan Daerah
2. Peningkatan jejaring Kemitraan dan Singkronisasi kebijakan

Pengendalian Penduduk

3. Pelaksanaan Advokasi Bidang Pengendalian Penduduk
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB
5. Sosialisasi dan pembentukan sekolah Siaga kependudukan
6. Pelaksanaan informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB berbasis Kearifan Budaya Lokal

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Kondisi Awal	2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Rp (000)								
Meningkatkan Pelayanan Pemerintah yang baik,	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Perangkat Pendukung Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,773,000	100%	1,796,000	100%	1,510,000	100%	3,457,277	100%	3,680,777
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	20000 eksamplar	1500 eks	10,000	2000 eks	18,000	3000 eks	17,000	4000 eks	17,500	5000 eks	18,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Telepon, air dan listrik	3 Mbps, dan 1.000.000 Kwh	3 Mbps, dan 1.000.000 Kwh	130,000	3 Mbps, dan 1.000.000 Kwh	135,000	3 Mbps, dan 1.000.000 Kwh	145,000	3 Mbps, dan 1.000.000 Kwh	150,000	3 Mbps, dan 1.000.000 Kwh	155,000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga dan Jenis BahanKebersihan kantor Yang disediakan	12 Orang	12 Orang	280,000	12 Orang	285,000	12 Orang	270,000				
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah Tenaga Perbaikan Peralatan	180 OB	36 OB	50,000			36 OB	65,000				
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	265 jenis	52 Jenis	95,000	52 Jenis	110,000	52 Jenis	125,000	52 Jenis	140,000	57 Jenis	150,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	115 Jenis	23 Jenis	100,000	23 Jenis	105,000	23 Jenis	115,000	23 Jenis	120,000	23 Jenis	120,000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik Penerangan kantor yang disediakan	75 jenis	15 jenis	75,000	15 jenis	75,000	15 jenis	75,000	15 jenis	70,000	15 jenis	70,000

RENCANA STRATEGIS

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Tagihan Surat Kabar dan Bahan Bacaan	75 jenis	15 jenis	75,000								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM dan Oli yang disediakan	15000 liter	3000 liter	75,000	3000 liter	90,000	3000 liter	110,000	3000 liter	130,000	3000 liter	130,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	5000 kotak	1000 kotak	75,000	1000 kotak	75,000	1000 kotak	75,000	1000 kotak	60,000	1000 kotak	60,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pegawai Yang melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	125 Orang	25 Orang	480,000	25 Orang	500,000	25 Orang	1.350.000	25 Orang	1.500.000	25 Orang	1.550.000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran (orang)	480 OB	96 OB	138,000	96 OB	138,000	96 OB	248,000	96 OB	250,000	96 OB	258,000
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor (orang)	780 OB	156 OB	190,000								
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	jumlah barang dan jasa perkantoran								19 Unit	1,107,434	19 Unit	1,207,434
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	jumlah tenaga pelayanan perkantoran								35 Orang	1,147,343	35 Orang	1,247,343
Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur,	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	25%	30%	485,000	40%	805,000	50%	863,000	55%	920,047	60%	1,226,034
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	jumlah rumah jabatan dinas yang dipelihara	4 unit			1 unit	25,000	1 unit	70,000	1 unit	76,000	1 unit	80,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	125 unit			25 unit	60,000	25 unit	88,000				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan dinas (unit)	13 unit	17 unit	100,000	19 unit	115,000	21 unit	125,000	24 unit	10,000	24 unit	180,000

RENCANA STRATEGIS

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	jumlah Gedung kantor yang direhab	3 Gedung	1 Gedung	250,000	1 Gedung	250,000	1 Gedung	250,000	1 Gedung	100,000	1 Gedung	200,000
Penambahan Ruang Gedung Kantor/Pembuatan Partisi Gedung Kantor	jumlah Gedung Kantor yang dibangun	4 gedung	-	-	1 Gedung	150,000	1 Gedung	100,000				
Pengadaan peralatan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 kegiatan	1 tahun	135,000	1 tahun	165,000	1 tahun	180,000				
Pengadaan Meubilier	jumlah Meubilirer	8 unit			2	40,000	2	50,000	2	60,000	2	60,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	jumlah sarana dan prasarana perkantoran								10 unit	333,017	10 unit	353,017
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	jumlah sarana dan Prasarana yang di pelihara								19 unit	341,030	19 unit	353,017
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Ketersediaan Perangkat Pendukung Disiplin Aparatur	50%	55%	60,000	60%	96,000	65%	96,000	70%	96,000	75%	96,000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (stel)	175 pasang	35 pasang	20,000	35 pasang	32,000						
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus (stel)	175 pasang	35 pasang	20,000	35 pasang	32,000						
Pengadaan Pakaian Olah Raga dan Kelengkapannya	jumlah pakaian olahraga (stel)	175 pasang	35 pasang	20,000	35 pasang	32,000						
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan kompetensi ASN	100%	100%	160,000	100%	200,000	100%	220,000	100%	240,000	100%	260,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 ASN	5 ASN	80,000	7 ASN	100,000	9 ASN	110,000	11 ASN	120,000	13 ASN	130,000

RENCANA STRATEGIS

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK Peraturan Perundang-undangan	35 ASN	5 ASN	80,000	7 ASN	100,000	9 ASN	110,000	11 ASN	120,000	13 ASN	130,000
Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan kinerja dan Keuangan Yang tersusun	100%	100%	40,000	100%	245,000	100%	408,000	100%	410,000	100%	470,000
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD	2 dokumen	-	-	2 dokumen	35,000	2 dokumen	40,000	2 dokumen	40,000	2 dokumen	45,000
evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Jumlah Dokumen Rencana Strategis	2 dokumen	-	-	1 dokumen	25,000	-	-			1 dokumen	25,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD	Dokumen Perencanaan OPD	8 dokumen	-	-	2 dokumen	25,000	2 dokumen	25,000				
Penyusunan Dokumen SAKIP OPD	laporan SAKIP OPD (dokumen)	75 dokumen			15 dokumen	25,000	15 dokumen	65,000	15 dokumen	65,000	15 dokumen	75,000
Penyusunan Profil OPD	Tersusunnya Dokumen Profil	5 dokumen	1 dokumen	20,000	1 dokumen	25,000	1 dokumen	50,000				
Pengelolaan Website Dinas	jasa informasi website OPD (tbulan)	60 data	-	-	12 data	85,000	12 data	85,000	12 data	45,000	12 data	45,000
penyusunan SOP OPD	jumlah dokumen SOP OPD	1 dokumen	-	-			1 dokumen	25,000	-	-	-	-
Penyusunan dokumen SPIP OPD	Jumlah Dokumen SPIP OPD OPD	25 dokumen	-	20,000	25 dokumen	25,000	25 dokumen	38,000	25 dokumen	30,000	25 dokumen	30,000
Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi kegiatan	Jumlah Dokumen evaluasi program	2 dokumen	-	-			2 dokumen	80,000	2 dokumen	80,000	2 dokumen	80,000

RENCANA STRATEGIS

			Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) OPD dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	jumlah dokumen capaian kinerja dan pengendalian yang disusun	35 dokumen	-	-					35 dokumen	150,000	35 dokumen	170,000	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya penanganan terhadap PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang diberdaya	N/A	50%	520,000	55%	2,762,000	60%	2,582,000	70%	2,388,000	75%	2,474,000	
			Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	jumlah KUBE yang menerima bantuan sosial	120 KUBE			20	432,000							
			Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Kelompok Masyarakat (Bantuan Mesin Jahit untuk Kelompok Masyarakat Miskin)	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Masyarakat yang Menerima Bantuan Mesin Jahit	5 Kelompok						1 Kelompok	80,000	2 Kelompok	45,000	2 Kelompok	50,000
			Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Untuk Kelompok Masyarakat Miskin (Bantuan Alat dan Perlengkapan Kelompok Usaha Bersama Mie Sagu "Maju" Selatpanjang)	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Masyarakat yang Menerima Bantuan	6 Kelompok						1 Kelompok	27,000	1 Kelompok	27,000	1 Kelompok	28,000
			Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	jumlah TKSM/TKSK, peksos, (orang) yang dibina	9 orang				10	80,000	10	80,000	10	81,000	10	81,000
			Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	9 orang	9 Orang	140,000	9 Orang	140,000	10 Orang	210,000	10 Orang	120,000	10 Orang	120,000	
			Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Meningkatkan	105 Orang						35 Orang	220,000				
			Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	Jumlah Anggota WKSBM yang di bina	100 Orang						30 Orang	120,000				

RENCANA STRATEGIS

Pembinaan Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti	jumlah pengurus karang taruna yang dibina (orang)	180 orang		-	30 Orang	360,000	30 Orang	200,000	40 Orang	250,000	40 Orang	250,000
Pelatihan kepemimpinan Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti	jumlah pengurus karang taruna yang dibina (orang)	350 orang		-	50 Orang	90,000	100 Orang	190,000				
Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah warga yang diberikan pembinaan (orang)	100 orang	20 Orang	30,000	20 Orang	60,000	20 Orang	60,000				
Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Anggota Lembaga yang dibina	20 Orang					20 Orang	95,000	20 Orang	100,000	20 Orang	100,000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Kemasyarakatan Kab. Kepulauan Meranti	jumlah Sarana dan Prasarana Sosial Kemasyarakatan Kab. Kepulauan Meranti yang dibantu	100 orsos			20 orsos	800,000	20 orsos	400,000				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Serikat Kematian Kab. Kepulauan Meranti	jumlah Sarana dan Prasarana Serikat Kematian Kab. Kepulauan Meranti yang dibantu	100 orsos	4 orsos	350,000	20 orsos	800,000	20 orsos	800,000	20 orsos	1,300,000	20 orsos	1,300,000
Pembinaan WKSBM	Jumlah Anggota WKSBM yang dibina	300 orang					100 Orang	100,000	100 Orang	50,000	100 Orang	50,000
Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	jumlah PSKS yang aktif	35 orang							35 orang	415,000	35 orang	495,000
Program pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial	Persentase nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial	80%	80%	271,000	85%	326,000	90%	520,000	95%	568,000	95%	578,000
Pelayanan dan penyantunan bagi perintis dan janda perintis kemerdekaan	jumlah janda perintis kemerdekaan dan veteran yang diberikana santunan (orang)	20 orang		-	20 orang	45,000						

RENCANA STRATEGIS

			Pemeliharaan Rutin/Berkala TMP Bunga Bangsa Selatpanjang	Jumlah Sarana TMP yang dipelihara	1 Komplek TMP	1 Komplek TMP	26,000	1 Komplek TMP	26,000	1 Komplek TMP	60,000				
			Pelaksanaan Apel Kehormatan Renungan Suci (AKRS) / Ziarah di TMP Bunga Bangsa, dalam rangka Hari Besar Nasional, 17 Agustus	Jumlah Peserta Apel	1500 Orang	300 Orang	93,000	300 Orang	93,000	300 Orang	93,000	300 Orang	93,000	300 Orang	93,000
			Pelaksanaan Apel Kehormatan Renungan Suci (AKRS) / Ziarah TMP Bunga Bangsa dalam rangka Hari Besar Nasional, Hari Pahlawan 10 November	Jumlah Peserta Apel	1000 Orang	200 Orang	40,000	200 Orang	45,000	200 Orang	50,000	200 Orang	55,000	200 Orang	60,000
			Pelaksanaan Acara Pemberian Grasi, Remisi dan Amnesty di Rutan Selatpanjang dalam rangka Hari Besar Nasional, 17 Agustus	Jumlah Peserta Apel	1000 Orang	200 Orang	59,000	200 Orang	64,000	200 Orang	69,000	200 Orang	79,000	200 Orang	84,000
			Pelaksanaan Apel Peringatan hari Kesetiakawanan sosial nasional HKSNI kepulauan meranti	Jumlah Peserta Apel	200 Orang	-	-	100	150,000	100	150,000	100	150,000	100	150,000
			bakti sosial dalam rangka memperingati hari kesetiakawanan sosial	Tercapainya bakti sosial dalam rangka memperingati hari kesetiakawanan sosial	250 Orang	50 Orang	53,000	50 Orang	53,000	50 Orang	53,000	50 Orang	53,000	50 Orang	53,000
			Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	jumlah Peserta Apel Hari Besar Nasional	300 orang						300 orang	93,000	300 orang	93,000	
			Program Pemberdayaan fakir Miskin dan KAT	Persentase fakir miskin dan KAT yang Diberdayakan	50%	60%	804,000	70%	1,620,000	80%	4,772,000	85%	7,110,000	90%	7,140,000
			Monitoring Evaluasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	jumlah dokumen monev	30 Kelompok		-			30 Kelompok	57,000	41 Kelompok	75,000	41 Kelompok	75,000

RENCANA STRATEGIS

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemukiman bagi Kelompok Keluarga Fakir Miskin (FM)	jumlah sarana prasarana masyarakat miskin yang direhab (unit)	400 Rumah	50 Rumah	804,000	60 Rumah	800,000	75 Rumah	1,580,000	90 Rumah	1,880,000	90 Rumah	1,880,000
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	jumlah komunitas Adat terpencil (KK) yang diberdayakan	1000 orang	-	-	-	200 orang	150,000	200 orang	150,000	200 orang	150,000	150,000
Pembangunan Balai Adat KAT Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Balai Adat KAT yang di bangun	2 Unit	-	-	-	1 Unit	100,000	-	-	1 Unit	150,000	150,000
Bedah Rumah Masyarakat Fakir Miskin	jumlah rumah masyarakat miskin yang di bedah (unit)	60 rumah	-	-	-	35 rumah	1.400.000	50 rumah	1.500.000	60 rumah	1.700.000	1.700.000
Pelatihan petugas lapangan Verifikasi dan Validasi data kemiskinan	jumlah Petugas lapangan Verifikasi dan Validasi data kemiskinan	101 orang	-	-	101 orang	265,000	-	101 orang	265,000	101 orang	265,000	265,000
Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT)	jumlah dokumen data kemiskinan	26000 KPM	-	-	26000 KPM	355,000	26000 KPM	360,000	26000 KPM	600,000	26000 KPM	650,000
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Kepulauan Meranti	jumlah warga KAT yang dibina	300 orang	-	-	250 orang	100,000	100 orang	280,000	100 orang	580,000	100 orang	380,000
Pemetaan Sosial Komunitas Adat terpencil (KAT)	jumlah warga KAT yang dibina	500 orang	-	-	250 orang	100,000	250 orang	100,000	250 orang	180,000	250 orang	180,000
Rakor dan Sosialisasi Pendistribusian Pangan Raskin ke Rumah Tangga Sasaran (RTS)	Jumlah Peserta	500 orang	-	-	-	-	150 orang	130,000	150 orang	200,000	150 orang	200,000
Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah Peserta yang Menerima Bantuan	238 Orang	-	-	-	-	78 Orang	35,000	80 Orang	45,000	80 Orang	60,000
Pendistribusian Pangan RASTRA kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah penerima rastra	26,000 KK	-	-	-	-	26,000 KK	1,500,000	26,000 KK	2,500,000	26,000 KK	2,500,000
Revitalisasi Kelembagaan Musyawarah Desa (Mudes) dalam pengendalian pelaksanaan program Rastra	Jumlah pengurus Kelembagaan Musdes yang dibina	100 orang	-	-	-	-	100 orang	120,000	100 orang	200,000	100 orang	200,000

RENCANA STRATEGIS

Semiloka Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah KAT yang diberdayaakan	200 orang						100 orang	120,000	100 orang	125,000	100 orang	130,000
Bimbingan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah KAT yang diberdayaakan	600 orang						200 orang	120,000	200 orang	180,000	200 orang	180,000
Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan (PASK) Komunitas Adat Terpencil Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah KAT yang diberdayaakan	300 orang						100 orang	120,000	102 orang	130,000	102 orang	140,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	jumlah PMKS yang menerima layanan rehabilitasi	N/A	123 orang	394,000	130 orang	594,000	140 orang	1,323,000	130 orang	1,910,000	140 orang	1,885,000	
Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana	Jumlah pasien Psikososial yang dikirim ke Trauma Center termasuk bagi korban bencana (orang)	150 orang	30 orang	100,000	30 orang	150,000	40 orang	160,000	40 orang	160,000	40 orang	220,000	
Peningkatan Pelayanan Pengiriman Pasien Psykosis ke PSBL Bengkulu	Jumlah Pasien Psykosis yang diberikan pelayanan (orang)	20 orang	-	-	2 orang	50,000	4 orang	140,000					
Pengiriman dan Bantuan Sosial Klien	Jumlah sosial klien yang dikirim	75 orang	15 orang	45,000	15 orang	65,000	15 orang	150,000	15 orang	50,000	15 orang	50,000	
Peningkatan kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah sarana dan prasarana alat bantu Diri yang diberikan kepada Penyandang Cacat dan PMKS lainnya (orang)	15 orang	3 orang	128,000	3 orang	108,000	3 orang	198,000					
Pemulang Orang Terlantar Ke daerah Asal	Jumlah Orang Terlantar yang dipulangkan Ke daerah Asal (orang)	100 orang	20 orang	23,000	30 orang	33,000	40 orang	70,000	40 orang	70,000	40 orang	70,000	
Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan	150 orang	30 orang	23,000	30 orang	33,000	30 orang	50,000	30 orang	50,000	30 orang	50,000	

RENCANA STRATEGIS

		Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Buruh Migran tindak Kekerasan	Jumlah Korban Tindak Kekerasan yang menerima pelayanan	25 orang	5 orang	30,000	5 orang	30,000	5 orang	60,000			
		Peningkatan Pelayanan Bantuan Lansia Terlantar	Jumlah Lansia Terlantar yang menerima bantuan	40 orang	-	-	-	-	10 orang	100,000			
		Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)	Jumlah anak bermasalah dan PMKS lainnya yang diberikan pelayanan (orang)	300 orang	20 orang	45,000	20 orang	75,000	20 orang	85,000	80 orang	480,000	80 orang 485,000
		Pelatihan keterampilan bagi bekas warga binaan lembaga Pemasyarakatan	Jumlah BWBLP yang mengikuti pelatihan keterampilan sosialisasi (orang)	60 orang	-	-	-	-	15 orang	160,000	15 orang	100,000	
		Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Korban Napza	Jumlah Korban Napza yang diberikan pelayanan rehabilitasi	20 orang	-	-	2 orang	50,000	4 orang	150,000	6 orang	50,000	8 orang 60,000
		Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	jumlah PMKS yang menerima Layanan rehabilitasi	96 orang	-	-	-	-	-	-	48 orang	500,000	48 orang 500,000
		Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)	jumlah Korban Tindak Kekerasan yang menerima layanan	40 orang	-	-	-	-	-	-	20 orang	450,000	20 orang 450,000
		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang menerima layanan Rehabilitasi	N/A					25 orang	350,000	25 orang	360,000	25 orang 370,000
		Pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks Penyandang Penyakit Sosial yang menerima layanan Rehabilitasi	75 orang	-	-	-	-	25 orang	350,000	25 orang	360,000	25 orang 370,000

RENCANA STRATEGIS

Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Penyandang Cacat dan Truma yang dibina	N/A		-	80%	275,000	85%	350,000	90%	380,000	100%	390,000
Bantuan Peralatan Usaha Bagi Penyandang Cacat	jumlah penyandang cacat yang diberikan bantuan peralatan usaha	40 orang	-	-	10 orang	200,000						
Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan	40 orang	-	-	10 orang	75,000	10 orang	150,000	10 orang	180,000	10 orang	190,000
Program Perlindungan Jaminan Sosial keluarga	Peersentase PMKS yang mendapatkan perlindungan	N/A	20%	886,000	25%	1,191,000	30%	1,965,384	35%	1,965,384	40%	1,965,384
Sosialisasi Program Keluarga Harapan	jumlah peserta Sosialisasi Program Keluarga Harapan	650 orang	50 orang	95,000	150 Orang	200,000						
Pendampingan Program Keluarga Harapan	Fasilitasi Program Keluarga Harapan	41 Pendamping	41 Pendamping	791,000	98 Pendamping	791,000	98 Pendamping	1,565,384	98 Pendamping	1,565,384	98 Pendamping	1,565,384
Rapat koordinasi Program Keluarga Harapan	jumlah peserta Rakor Program Keluarga Harapan	600 orang	-	-	150 orang	100,000						
Monitoring Evaluasi Pelaporan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	jumlah KPM Program Keluarga Harapan (PKH)	750 orang	-	-	150 orang	100,000						
Program Penyuluhan Sosial	jumlah PMKS yang diberikan penyuluhan	20%			20%	50,000	25%	235,000	30%	240,000	24%	210,000
Peningkatan Penyuluhan Sosial di 9 Kecamatan	Jumlah peserta yang diberikan penyuluhan	300 orang	-	-	-	-	100 orang	180,000	100 orang	180,000	100 orang	150,000
Monitoring dan Evaluasi Program Penyuluhan Sosial	Jumlah PMKS yang dikunjungi	120 orang	-	-	30 orang	50,000	30 orang	55,000	30 orang	60,000	30 orang	60,000
Program Rehabilitasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan		70%	210,000	80%	340,000	85%	340,000	85%	360,000	90%	260,000

RENCANA STRATEGIS

			Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa / (Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial)	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang menerima pelayanan	150 KK	30 KK	210,000	30 KK	280,000	30 KK	280,000	30 KK	300,000	30 KK	210,000
			Fasilitasi bantuan sosial korban bencana Alam / bencana sosial	jumlah korban bencana alam/bencana sosial yang difasilitasi (orang)	125 KK			25 KK	60,000	25 KK	60,000	25 KK	60,000	25 KK	50,000
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase gender binaan yang berperan aktif dalam pembangunan	60%	60%	355,000	70%	260,000	80%	1,719,489	85%	1,862,310	900%	1,960,591
			pembinaan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah organisasi wanita yang dibina	2 organisasi	2 organisasi	100,000	2 organisasi	150,000	2 organisasi	250,000	2 organisasi	250,000	2 organisasi	250,000
			pembinaan Organisasi perempuan Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah organisasi Perempuan yang meningkatkan kapasitasnya	2 organisasi	-	-	-	2 organisasi	130,000	2 organisasi	253,000	2 organisasi	278,300	
			Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah Perempuan yang diberikan bimbingan manajemen usaha	75 kelompok	-	-	-	25 kelompok	315,000	25 kelompok	346,000	25 kelompok	381,150	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kecamatan yang di monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait usaha bagi perempuan	9 kecamatan	-	-	-	9 kecamatan	165,000	9 kecamatan	185,000	9 kecamatan	185,000	
			Pelaksanaan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah Ibu yang terevitalisasi GSI	135 orang	-	-	-	45 Orang	154,489	45 Orang	158,937	45 Orang	174,831	
			Peningkatan Capacity Building Pengurus Organisasi Wanita Kabupaten	jumlah pengurus organisasi wanita yang meningkat kemampuannya	90 Orang	-	-	-	30 Orang	150,000	30 Orang	150,000	30 Orang	150,000	
			Penguatan Kelembagaan UP2K	Jumlah UP2K yang dibina	135 kelompok	-	-	-	45 kelompok	150,000	45 kelompok	150,000	45 kelompok	150,000	
			Lomba UP2K Kabupaten Kepulauan Meranti	jumlah peserta lomba UP2K	135 orang	-	-	-	45 orang	150,000	45 orang	150,000	45 orang	150,000	

RENCANA STRATEGIS

		Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Perempuan yang meningkat peran sertanya dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera	180 orang	60 Orang	255,000	60 Orang	110,000	60 Orang	255,000	60 Orang	219,373	60 Orang	241,310
Prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Persentase Kelembagaan Perempuan dan Anak yang aktif	40%	40%	490,000	45%	955,432	50%	3,422,847	50%	3,305,199	50%	3,673,519
		Peningkatan Kapasitas Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Forum Anak yang Meningkatkan Kapasitasnya	57 Lembaga	18 Lembaga	260,000	18 Lembaga	260,000	18 Lembaga	260,000	19 Lembaga	280,000	20 Lembaga	300,000
		Advokasi PUG bagi Perempuan	Jumlah OPD yang teradvokasi dan terfasilitasi PUG	35 OPD	-	-	35 organisasi	120,000	35 OPD	125,600	35 OPD	140,000	35 OPD	155,000
		Pemetaan dan Potensi Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah dokumen Organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga PUG dan anak yang meningkat kapasitasnya	27 OPD	-	-	-	-	9 OPD	350,000	9 OPD	360,000	9 OPD	370,000
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang meningkat kapasitasnya	18 lembaga	-	-	-	-	-	-	9 lembaga	285,000	9 lembaga	295,000
		Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah institusi/non institusi yang sudah menerapkan anggaran responsif gender	35 Lembaga	-	-	-	-	35 Lembaga	180,000	-	-	35 Lembaga	180,000
		Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah perempuan peserta workshop yang meningkatkan perannya dalam pengambilan keputusan	60 orang	-	-	-	-	10 Orang	184,000	20 Orang	215,000	30 Orang	367,000
		Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	jumlah lembaga yang dibina	18 lembaga	-	-	-	-	-	-	9 lembaga	195,000	9 lembaga	214,500

RENCANA STRATEGIS

pengembangan sistem informasi gender dan anak	Jumlah Profil gender dan anak	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	390,000	-	-	-	-
seminar upaya pencegahan narkoba dan tindak kekerasan bagi anak	jumlah peserta yang mengikuti seminar	200 orang	-	-	-	-	100 orang	100,000	100 orang	100,000	-	-
Lomba Kreasi Anak	jumlah Anak yang mengikuti lomba	90 orang	-	-	-	-	45 orang	100,000	45 orang	100,000	-	-
Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja	jumlah orang tua yang bertambah pengetahuannya dalam pembinaan pola asuh anak dan remaja	500 orang	-	-	-	-	224 orang	100,000	250 orang	100,000	-	-
Pembinaan Kelompok Peduli KDRT	jumlah peserta kelompok peduli KDRT yang dibina	90 orang	-	-	-	-	45 Orang	100,000	45 Orang	100,000	-	-
Kabupaten Layak Anak	Jumlah Dokumen Capaian KLA Yang disusun	1 Naskah			1 Naskah	160,000	1 Naskah	180,000	1 Naskah	190,000	1 Naskah	200,000
Penyusunan Naskah Akademik Perda Perlindungan Perempuan	Jumlah Naskah Akademik Perlindungan Perempuan yang disusun	1 Naskah					1 Naskah	180,000	1 Naskah	190,000	1 Naskah	200,000
Pengembangan Kapasitas SDM Konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah Kapasitas SDM yang Terlatih	150 orang					50 orang	300,000	50 orang	325,000	50 orang	350,000
Advokasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah peserta teradvokasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	35 Peserta					11 Peserta	120,000	12 Peserta	130,000	12 Peserta	140,000
Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah Profil Gender dan Anak yang disusun	3 Dokumen					1 Dokumen	310,000	1 Dokumen	325,000	1 Dokumen	350,000
Penyuluhan antisipasi dini Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	jumlah peserta	510 orang	-	-	100 orang	185,432	120 orang	213,247	140 orang	245,234	150 orang	282,019
Pelaksanaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A	250 kasus	30 kasus	230,000	40 kasus	230,000	50 kasus	230,000	60 kasus	24,965	70 kasus	270,000

RENCANA STRATEGIS

	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan Anak	Perempuan Perempuan dan Anak yang terlindungi	70%	70%	116,303,000	75%	250,000	80%	1,538,407	90%	1,755,000	100%	1,837,000
	Penguatan Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah anak yang terpenuhi hak partisipasinya	180 orang	60 orang	230,000	60 orang	250,000	60 orang	250,000	60 orang	250,000	60 orang	250,000
	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah peserta pelatihan (TOT) untuk pendampingan dan pelayanan pada korban KDRT	60 orang	-	-	-	-	20 orang	222,700	20 orang	245,000	20 orang	267,000
	Pelaksanaan upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan	Jumlah SDM yang kompeten dalam upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	90 orang	-	-	-	-	30 Orang	155,000	40 Orang	255,000	40 Orang	255,000
	Pembentukan Satgas P2TP2A di Kecamatan	Jumlah SATGAS kecamatan yang terbentuk	9 kecamatan	3 kecamatan	116,073,000	-	-	3 kecamatan	245,000	3 kecamatan	245,000	3 kecamatan	245,000
	Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	Jumlah SDM terlatih KHA	135 orang	-	-	-	-	40 Orang	295,707	45 orang	370,000	50 orang	410,000
	Kecamatan Ramah Anak	Jumlah Kecamatan Ramah Anak	3 Kecamatan	-	-	-	-	1 Kecamatan	370,000	1 Kecamatan	390,000	1 Kecamatan	410,000
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Persentase Kelengkapan Peraturan terkait Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan yang ditetapkan				70%	230,000	80%	630,000	90%	765,000	100%	765,000
	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	jumlah peserta sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	30 organisasi	-	-	-	-	10 organisasi	150,000	10 organisasi	165,000	10 organisasi	165,000
	Kajian Akademik Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan	Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	230,000	1 dokumen	200,000	1 dokumen	200,000
	Kajian Akademik Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak	Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung Pengembangan Kabupaten Layak Anak	1 dokumen	-	-	1 dokumen	230,000	-	-	1 dokumen	200,000	1 dokumen	200,000

RENCANA STRATEGIS

			- Penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti	Jumlah profil gender dan anak	1 profil					1 profil	250,000	1 profil	200,000	1 profil	200,000
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Program Keluarga Berencana	Persentase Akseptor KB Aktif	75%	80%	372,800	85%	2,758,448	90%	6,056,237	90%	5,896,965	95%	6,738,312	
		Pembinaan dan Pelatihan Kader Tribina	Jumlah Kader BKB, BKR, BKL	300 orang	60 orang	130,000	60 orang	135,000	60 orang	140,000	60 orang	145,000	60 orang	150,000	
		Penyediaan Jasa Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kab. Kep. Meranti	Jumlah PLKB	9 orang	9 orang	232,000	9 orang	232,000	9 orang	242,000	9 orang	242,000	9 orang	242,000	
		Penyusunan Grand Desain Pengendalian Penduduk Kab. Kepulauan Meranti	jumlah dokumen Grand Desain Pengendalian Penduduk yang disusun	1 dokumen	-	-				1 Dokumen	180,000	-	-	-	-
		Advokasi Dokumen Grand Design Kependudukan dan Penetapan Parameter Kependudukan	jumlah dokumen parameter kependudukan yang disusun	1 dokumen	-	-				1 Dokumen	180,000	1 Dokumen	180,000	-	-
		Penggarapan KB di Wilayah Sasaran Khusus dan GALCITAS	Jumlah Akseptor KB	1500 Akseptor										400 Akseptor	155,576
		Sosialisasi dan Fasilitasi Operasi Medis bagi Calon Peserta KB MOP/MOW	Jumlah Akseptor KB	500 Akseptor										120 Akseptor	175,000
		Pertemuan Peningkatan Peran Dokter dan Bidan Praktek Mandiri dalam Penguatan Pelayanan KB MKJP	Jumlah Dokter dan Bidan Praktek Mandiri	650 orang	-	-				150 orang	180,000	175 orang	125,000	200 orang	150,000
		Pembangunan/Alih Fungsi Balai Penyuluhan KB (DAK FISIK)	Jumlah balai yang dibangun	9 Balai						2 balai	900,000	1 balai	500,000	1 balai	500,000
		Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK Fisik)	Jumlah sarana kerja PLKB	30 Unit						5 unit	810,000	5 unit	810,000	5 unit	810,000
		Pengadaan sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan (DAK FISIK)	Jumlah sarana kerja PLKB	25 unit						4 unit	150,000	4 unit	150,000	4 unit	150,000

RENCANA STRATEGIS

Pengadaan Sarana Pendataan (DAK FISIK)	Jumlah Sarana Pendataan	36 unit			12 unit	180,000	12 unit	180,000	12 unit	200,000	12 unit	220,000
Pengembangan Balai Penyuluh KB (DAK FISIK)	Jumlah Balai yang Direhab	3 Balai					1 Balai	320,000	1 Balai	350,000	1 Balai	380,000
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) DAK Non Fisik	Terpenuhinya Operasional Kegiatan Keluarga Berencana	5 tahun			1 tahun	2,200,000	1 tahun	2,600,000	1 tahun	3,000,000	1 tahun	3,600,000
Pelaporan dan Pengelolaan data dan informasi program KB	Jumlah Laporan data KB	60 Dokumen	12 Dokumen	10,800	12 Dokumen	11,448	12 Dokumen	12,134	12 Dokumen	12,862	12 Dokumen	13,633
Advokasi dan Fasilitas Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Bagi Tenaga Kesehatan	jumlah tenaga kesehatan yang di advokasi	150 orang					50 orang	162,103	50 orang	182,103	50 orang	192,103
Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Akseptor KB baru aktif		80%	645,944	85%	601,764	85%	716,063	90%	757,311	95%	803,806
Penyediaan Pelayanan KB melalui TNI KB Kesehatan	Jumlah Akseptor KB	3970 Akseptor	680 Akseptor	138,144	760 Akseptor	151,959	800 Akseptor	167,154	860 Akseptor	183,878	870 Akseptor	202,257
Penyediaan Pelayanan KB melalui PKK KB Kesehatan	Jumlah Akseptor KB	2750 Akseptor	450 Akseptor	203,670	500 akseptor	215,890						
Penyediaan Pelayanan KB melalui IBI KB Kesehatan	Jumlah Akseptor KB	2600 Akseptor	440 Akseptor	162,700								
Penyediaan Pelayanan KB melalui Bhayangkari KB Kesehatan	Jumlah Akseptor KB	2000 Akseptor	300 Akseptor	141,430	350 akseptor	149,915	400 Akseptor	158,909	450 Akseptor	168,433	500 akseptor	178,549
Distribusi Alat Kontrasepsi dan Obat Kontrasepsi	9 Kecamatan	-	-	-	11 Faskes	44,000	11 Faskes	50,000	11 Faskes	55,000	11 Faskes	58,000
Penyediaan Peralatan dan Pemeliharaan Gudang Alat Kontrasepsi dan Obat Kontrasepsi	Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi yang memadai		-	-	5 Unit	40,000	8 Unit	50,000	10 Unit	60,000	12 Unit	75,000
Penyediaan Pelayanan KB	Jumlah Akseptor KB	2000 Akseptor	-	-			500 Akseptor	290,000	500 Akseptor	290,000	500 Akseptor	290,000
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Persentase masyarakat peserta KB/KR mandiri binaan yang aktif	80%	80%	1,069,055	80%	1,114,186	80%	1,200,444	80%	1,247,700	80%	1,297,863
Pembinaan dan Pelatihan Kader PPKBD/Sub PPKBD	jumlah kader PPKBD / Sub PPKBD	300 orang	60 orang	170,000								

RENCANA STRATEGIS

Orientasi Program KKBPB bagi TOMA/TOGA, LSOM dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta	150 orang	30 orang	120,000	30 orang	120,000	30 orang	130,000	30 orang	130,000	30 orang	130,000
Penyediaan Sarana Kerja PPKBD/Sub PPKBD	tersedianya sarana kerja PPKBD	500 orang	100 orang	125,000	100 orang	125,000	100 orang	125,000	100 orang	125,000	100 orang	125,000
Fasilitasi AKU (Asosiasi Kelompok UPPKS)	Jumlah Kelompok	25 Kelompok	5 Kelompok	151,000	10 Kelompok	166,100	15 Kelompok	18,271	20 Kelompok	20,098	25 Kelompok	22,107
Pelatihan Pengelolaan Kelompok UPPKS	jumlah kelompok UPPKS	225 orang	45 orang	159,140	45 orang	168,688	45 orang	178,809	45 orang	189,537	45 orang	200,909
Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB	jumlah kampung KB	9 desa	5 Desa	171,115	6 Desa	181,230	7 Desa	192,103	8 Desa	203,629	9 Desa	215,846
Pembinaan Kelompok UPPKS (Asosiasi Kelompok UPPKS) se - kabupaten	Jumlah Kelompok yang dibina	75 kelompok					25 kelompok	192,103	25 kelompok	203,629	25 kelompok	215,846
Peringatan Hari Keluarga Nasional	jumlah peserta peringatan hari keluarga nasional	5 Kelompok	8 Kelompok	172,800	8 Kelompok	183,168	8 Kelompok	194,158	8 Kelompok	205,807	8 Kelompok	218,155
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok BKB Holistik yang terbentuk	36 kelompok	9 kelompok	177,500	9 kelompok	187,830	9 kelompok	199,090	9 kelompok	211,030	9 kelompok	223,690
Fasilitasi Pembentukan BKB Holistik Integratif (BKB-Posyandu-PAUD)	Jumlah Kelompok	36 kelompok	9 kelompok	177,500	9 kelompok	187,830	9 kelompok	199,090	9 kelompok	211,030	9 kelompok	223,690
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase PIK-R aktif	75%	80%	134,000,000	85%	350,974	90%	372,032	95%	393,348	100%	416,947
Pelatihan PIK-R /M Jalur Sekolah/ Masyarakat	Jumlah peserta Pelatihan PIK-R /M JalurSekolah/ Masyarakat	240 orang			60 orang	184,970	60 orang	196,068	60 orang	393,348	60 orang	416,947
Ajang Prestasi Remaja	Jumlah peserta APR Tk. Kabupaten	300 orang	60 orang	134,000,000	60 orang	142,554	60 orang	151,107				
pembentukan PIK-R /M JalurSekolah/ Masyarakat	Jumlah PIK-R /M JalurSekolah/ Masyarakat	36 Kelompok			9 Kelompok	23,450	9 Kelompok	24,857				

RENCANA STRATEGIS

			Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase PIK-R yang dibina	50%					70%	184,900	80%	184,900	90%	184,900
			Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	Jumlah remaja di luar sekolah dan masyarakat yang diberikan konseling	150 orang					50 orang	184,900	50 orang	184,900	50 orang	184,900
			Program Pengendalian Penduduk	jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun dan diinformasikan					1 Dokumen	140,000	354,000		290,000		320,000
			pelaksanaan Analisis Dampak Kependudukan terhadap Pembangunan Daerah	jumlah dokumen Analisis Dampak Kependudukan yang disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	120,000	-	-	-	-
			Peningkatan jejaring Kemitraan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	jumlah jaringan kemitraan	2 organisasi	-	-	-	-	2 organisasi	94,000	-	-	-	-
			Pelaksanaan Advokasi bidang pengendalian penduduk	5 tahun	-	-	-	1 tahun	50,000	1 tahun	50,000	1 tahun	50,000	1 tahun	50,000
			penyediaan sarana dan prasarana informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	jumlah sarana dan Prasarana KIE	36 unit	-	-	9 unit	55,000	9 unit	55,000	9 unit	55,000	9 unit	55,000
			Sosialisasi dan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	Jumlah Sekolah yang dibina	9 sekolah	-	-					4 sekolah	150,000	5 sekolah	180,000
			Pelaksanaan Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB berbasis Kearifan Budaya Lokal	jumlah peserta yang dibina	60 orang	-	-	20 orang	35,000	20 orang	35,000	20 orang	35,000	20 orang	35,000

Bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

NO	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	N / A	70	80	85	90	90	90
2	Persentase PMKS yang ditangani	N / A	N / A	50	55	60	65	70
3	Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	N / A	N / A	0.175	0.232	0.289	0.346	0.403
4	Proporsi Perempuan yang menduduki posisi Manajerial	N / A	N / A	53	55	57	59	61
5	Angka kelahiran Total (TFR)	2,38	2,38	2.36	2.35	2.33	2.31	2.28

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti Tahun 2016-2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016-2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti Tahun 2016-2021 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan

kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti , maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinsos PPPA PPKB Kabupaten Meranti sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.